

**KONTRIBUSI STRATEGI INDUSTRIALISASI *THIRD INDUSTRIAL*
MASTER PLAN (IMP3) DALAM PROSES DEMOKRATISASI MALAYSIA**

TAHUN 2018-2023

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

SOFWAN FAJAR ARRASYID

22323093

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

**KONTRIBUSI STRATEGI INDUSTRIALISASI *THIRD INDUSTRIAL*
MASTER PLAN (IMP3) DALAM PROSES DEMOKRATISASI MALAYSIA**

TAHUN 2018-2023

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

SOFWAN FAJAR ARRASYID

22323093

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

HALAMAN PENGESAHAN
KONTRIBUSI STRATEGI INDUSTRIALISASI *THIRD INDUSTRIAL*
***MASTER PLAN* (IMP3) DALAM PROSES DEMOKRATISASI**
MALAYSIA TAHUN 2018-2023

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal
07 Juli 2026

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Dewan Penguji

Tanda Tangan

- 1 Farhan Abdul Majiid, S.Sos., M.A.
- 2 Alfredha Shinta Putri, S.IP., M.H.I.
- 3 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 19 Juni 2026



Sofwan Fajar Arrasyid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR DIAGRAM.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
ABSTRAK	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Cakupan Penelitian.....	11
1.5 Tinjauan Pustaka	11
1.6 Kerangka Pemikiran	17
1.7 Argumen Sementara.....	19
1.8 Metode Penelitian.....	20
1.8.1 Jenis Penelitian	20
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	20
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	21
1.8.4 Proses Penelitian	21
1.9 Sistematika Pembahasan.....	22
BAB 2 KONTRIBUSI <i>THIRD INDUSTRIAL MASTER PLAN</i> (IMP3) DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI MALAYSIA	23
2.1 Lanskap Demokrasi di Malaysia	24
2.2 Kontribusi IMP3 terhadap Kinerja Sektor Manufaktur Malaysia	28
2.3 Sektor Manufaktur sebagai Pendorong Peningkatan Taraf Hidup.....	43
2.4 <i>Economic Security</i> dan Perlindungan Sosial di Malaysia.....	49
BAB 3 TRANSFORMASI KULTURAL DAN DEMOKRATISASI MALAYSIA TAHUN 2018–2023	53
3.1 Pergeseran Nilai Masyarakat Malaysia	54
3.1.1 Kondisi <i>Survival Values</i> Masyarakat Malaysia	55
3.1.2 Kebangkitan <i>Self-Expression Values</i> di Masyarakat Malaysia	57

3.2 Munculnya Tuntutan Masyarakat Sipil	65
3.3 Peningkatan Kualitas Demokrasi dalam Proses Demokratisasi Malaysia Periode 2018-2023.....	68
BAB 4 PENUTUP	74
4.1 Kesimpulan.....	74
4.2 Rekomendasi	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pemetaan Literatur Teoretis	12
Tabel 2. Pemetaan Literatur Studi Kasus Malaysia	14
Tabel 3. Perbandingan Rasio Efisiensi Investasi (<i>Incremental Capital-Output Ratio</i>) Sektor Manufaktur dan Jasa Malaysia Tahun 2018-2023	37
Tabel 4. Simpulan Kontribusi IMP3 terhadap Sektor Manufaktur Malaysia (2018-2023)	42
Tabel 5. World Value Survey <i>Post Materialist Index</i>	59
Tabel 6. Simpulan Aksi Kolektif Tuntutan Masyarakat Sipil Malaysia Tahun 2018–2023	67

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. PDB Riil Malaysia Tahun 2017-2023 (Konstan 2015 US\$)	4
Grafik 2. Indeks Demokrasi Malaysia Tahun 2015-2023	5
Grafik 3. Nilai Arus Masuk <i>Foreign Direct Investment</i> (FDI) Sektor Manufaktur Malaysia Tahun 2018-2023	34
Grafik 4. Persentase Kontribusi Sektor terhadap PDB Malaysia Tahun 2018-2023	36
Grafik 5. <i>Gross Value Added</i> (GVA) Sektor Manufaktur Malaysia Tahun 2018-2023	40
Grafik 6. PDB Per Kapita, PPP (<i>Current International \$</i>) Malaysia Tahun 2018-2023	44
Grafik 7. Upah Median Nasional dan Upah Riil Rata-Rata Sektor Manufaktur Malaysia Tahun 2018-2023	45
Grafik 8. Perbandingan Persentase Pertumbuhan <i>Gross Value Added</i> (GVA) Manufaktur, Pertumbuhan Upah Median Nasional, dan Pertumbuhan Upah Median Sektor Manufaktur (2018-2023)	46
Grafik 9. Tren Persentase Kenaikan Indikator Perubahan Nilai	61
Grafik 10. Tren Indeks Demokrasi Malaysia Tahun 2018-2023	70

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Mekanisme Kausal Kontribusi Industrialisasi dalam Demokrasi	18
Diagram 2. Mekanisme Kausal Kontribusi Industrialisasi dalam Proses Demokratisasi Malaysia Tahun 2018–2023	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. World Value Survey Q112 (<i>Perception of Corruption</i>)	63
---	----

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis bagaimana strategi industrialisasi Malaysia melalui kerangka *Third Industrial Master Plan* (IMP3) berkontribusi dalam proses demokratisasi Malaysia periode 2018–2023. Permasalahan utama yang diangkat adalah mekanisme kausal antara keberhasilan kebijakan industrialisasi yang berorientasi pada pembangunan ekonomi dengan dinamika proses demokratisasi yang terjadi di Malaysia pada periode 2018–2023. Penelitian ini menggunakan kerangka Teori Modernisasi yang dikembangkan oleh Ronald Inglehart dan Christian Welzel, yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi mendorong perubahan nilai masyarakat dari *survival values* menuju *self-expression values*, yang kemudian menciptakan tuntutan terhadap sistem politik yang lebih demokratis. Argumen penelitian ini adalah bahwa strategi industrialisasi melalui IMP3 berkontribusi dalam proses demokratisasi Malaysia melalui satu rangkaian mekanisme kausal utama berupa pembangunan ekonomi, peningkatan taraf hidup, terjadinya *economic security*, dan transformasi nilai sosial masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan IMP3 dalam memperkuat sektor manufaktur berhasil meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Malaysia, yang secara gradual mendorong perubahan nilai menuju meningkatnya tuntutan atas akuntabilitas politik, reformasi institusi, dan partisipasi politik.

Kata-kata kunci: IMP3, Malaysia, Industrialisasi, Perubahan Nilai, Demokratisasi

ABSTRACT

This study analyzes how Malaysia's industrialization strategy through the Third Industrial Master Plan (IMP3) contributed to the country's democratization process during the 2018–2023 period. The main issue addressed in this research is the causal mechanism linking the success of industrialization policies oriented toward economic development with the dynamics of democratization in Malaysia during 2018–2023. This research employs the Modernization Theory developed by Ronald Inglehart and Christian Welzel, which argues that economic growth encourages a shift in societal values from survival values toward self-expression values, ultimately generating demands for a more democratic political system. The central argument of this study is that industrialization through IMP3 contributed to Malaysia's democratization process through a causal mechanism consisting of economic development, rising living standards, the emergence of economic security, and the transformation of social values. The findings show that the success of IMP3 in strengthening Malaysia's manufacturing sector significantly improved public welfare, which gradually encouraged value transformation and led to increasing demands for political accountability, institutional reform, and broader political participation.

Keywords: IMP3, Malaysia, Industrialization, Value Change, Democratization

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam studi ekonomi politik, diskusi mengenai korelasi antara pembangunan ekonomi dan tatanan politik didominasi oleh perdebatan teoretis yang kuat mengenai arah hubungan kausalitasnya. Pandangan pertama, yang dipelopori oleh para pemikir institusionalis, berargumen bahwa pelembagaan demokrasi yang baik dan stabil merupakan prasyarat mutlak (*pre-condition*) yang akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, kepastian hukum, serta iklim investasi yang kondusif untuk memicu pembangunan ekonomi berkelanjutan (Persson et al. 2009, 100).

Sebaliknya, pandangan kedua yang bersandar pada ranah Teori Modernisasi klasik maupun kontemporer menegaskan arah sekuensial yang berkebalikan, yakni pembangunan ekonomi justru yang bertindak sebagai fondasi utama untuk merombak struktur sosial-budaya masyarakat secara gradual, sehingga membuat tatanan demokrasi menjadi lebih mungkin untuk tumbuh dan bertahan dalam jangka panjang (Inglehart and Welzel 2005, 180). Penelitian ini secara tegas mengambil posisi dan berpatokan pada pandangan kedua, yaitu bahwa pembangunan ekonomi mendorong terjadinya proses demokratisasi. Dengan meletakkan pertumbuhan material sebagai variabel independen, studi ini berupaya membuktikan bahwa keterbukaan politik bukan sekadar hadiah institusional dari elite penguasa, melainkan sebuah perubahan struktural yang lahir dari penguatan fondasi ekonomi dan kapasitas kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.

Strategi pembangunan ekonomi berbasis industri telah lama menjadi pilihan bagi banyak negara dalam upaya mengejar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Proses industrialisasi tidak hanya berfungsi sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi tetapi juga membawa konsekuensi sosial dan politik yang signifikan (Van Noort 2024, 458). Gagasan bahwa industrialisasi berkontribusi pada proses demokratisasi menjadi aspek yang menarik untuk diteliti. Hal ini didasarkan pada Teori Modernisasi (Inglehart and Welzel 2005) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan memicu perubahan budaya yang membuat demokrasi semakin mungkin berkembang (Inglehart and Welzel 2005, 171).

Fokus penelitian ini tertuju pada Malaysia, sebuah negara di Asia Tenggara yang telah menunjukkan komitmen kuat terhadap industrialisasi sebagai pilar pembangunan nasionalnya. Pada tahun 1971, Malaysia memperkenalkan *New Economic Policy* (NEP) sebagai kebijakan industrialisasi pertama mereka yang kemudian dilanjutkan oleh *National Development Policy* (NDP) pada tahun 1991 (Lee 2022, 306). Dalam prosesnya, industrialisasi telah menjadi inti dari transformasi ekonomi Malaysia dari yang sebelumnya bergantung pada sektor primer menjadi negara dengan sektor manufaktur dan jasa yang berkembang (Kinuthia 2009, 15).

Sejak awal 1980-an, pemerintah Malaysia merumuskan strategi industri jangka panjang untuk mentransformasi ekonomi nasional dari ketergantungan terhadap sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier (Kinuthia 2011, 413). Kebijakan ini diwujudkan dalam bentuk *Industrial Master Plans* (IMPs), yang dirancang dalam tiga fase yaitu: IMP pertama (1986–1995) yang fokus pada

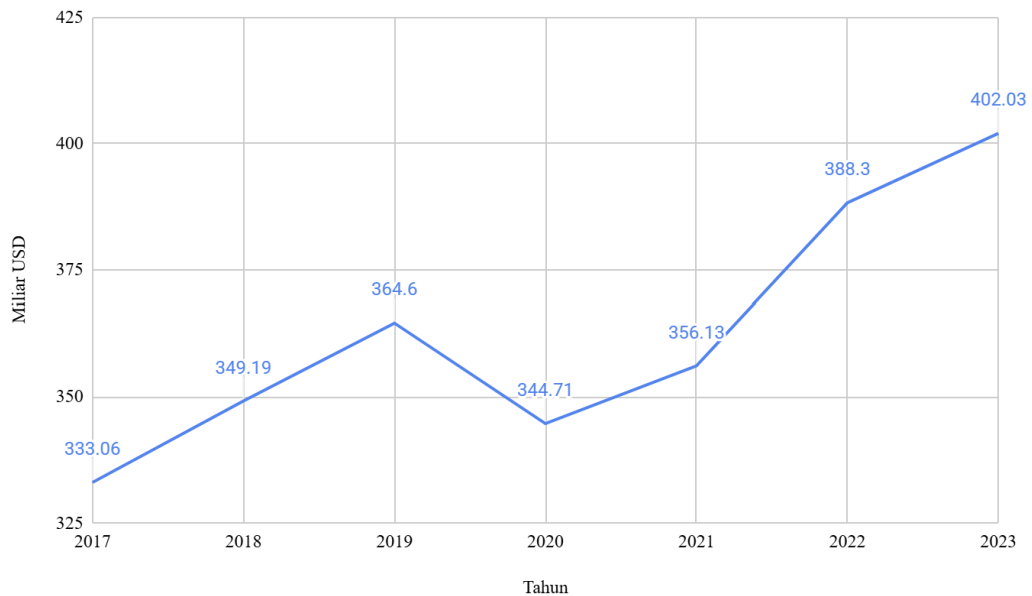
substitusi impor dan promosi ekspor, IMP kedua (1996–2005) yang memperkenalkan diversifikasi industri dan peningkatan produktivitas, serta IMP ketiga (2006-2023) yang mendorong masuknya arus penanaman modal asing sebagai katalisator pembangunan industri manufaktur (Mohamed et al. 2018, 12). Setiap fase IMP memiliki arah kebijakan spesifik, namun secara umum ketiganya dirancang untuk menjadikan Malaysia sebagai negara industri maju dengan struktur ekonomi yang kompetitif dan berdaya saing global.

Third Industrial Master Plan (IMP3), yang berlaku dari tahun 2006 hingga 2023, memegang peran krusial dalam proses industrialisasi Malaysia. IMP3 memberi penekanan khusus pada daya tarik Penanaman Modal Asing (*Foreign Direct Investment*) sebagai katalis untuk mengembangkan sektor-sektor bernilai tambah tinggi dan memfasilitasi transisi menuju ekonomi berbasis industri (Kinuthia 2011, 417). Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing global Malaysia, memperkuat rantai nilai industri, serta mendorong inovasi melalui transfer teknologi dan keahlian yang dibawa oleh Penanaman Modal Asing (Ministry of Investment, Trade and Industry Malaysia 2006). Salah satu tujuan utama IMP3 adalah menjadikan Malaysia sebagai pusat produksi manufaktur dan jasa global yang berbasis pada keterampilan tinggi (Ministry of Investment, Trade and Industry Malaysia 2006).

Dalam implementasinya, IMP3 berhasil mendorong pembangunan ekonomi Malaysia secara cukup signifikan. Berdasarkan data PDB riil Malaysia (konstan 2015 US\$) pada tahun 2018, PDB Malaysia tumbuh sekitar 4,8% dengan PDB riil sebesar \$349,19 miliar (World Bank 2026a). Laju pertumbuhan ini terutama didukung oleh sektor jasa dan manufaktur yang masing-masing menyumbang

sekitar 56,7% dan 23,2% terhadap PDB (Department of Statistics Malaysia 2019). Tren positif ini berlanjut pada tahun 2019 ketika PDB Malaysia tumbuh 4,3% dibandingkan tahun sebelumnya dengan PDB riil sekitar \$364,6 miliar (World Bank 2026a).

Grafik 1. PDB Riil Malaysia Tahun 2017-2023 (Konstan 2015 US\$)



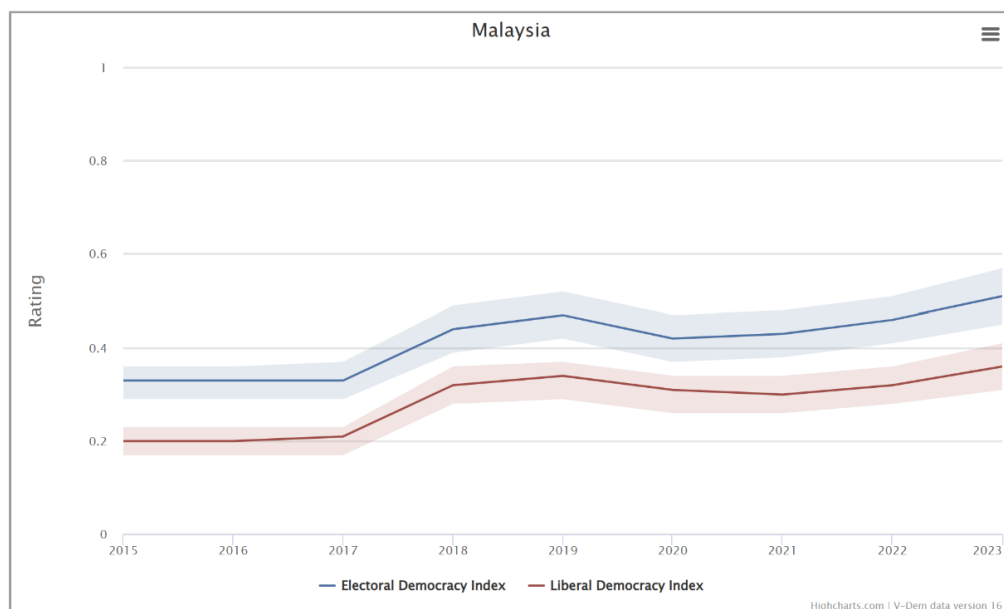
Sumber: World Bank (2026)

Meskipun laju pertumbuhan ekonomi Malaysia sempat terkontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi, tren pertumbuhan positif kembali terjadi pada tahun 2021 sebagai fase pemulihan awal pasca pandemi dengan persentase 3,1% dan kemudian mencapai pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 8,7% dengan PDB riil sebesar \$388,3 miliar (World Bank 2026). Pada tahun 2023, kenaikan terus berlanjut hingga PDB riil Malaysia menyentuh angka \$402,03 miliar (World Bank 2026). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh adanya kenaikan kontribusi sektor jasa dan manufaktur yang pada tahun tersebut menyumbang masing-masing 58,2% dan 24,2% terhadap PDB (Department of Statistics Malaysia 2024b). Pencapaian

tersebut menunjukkan sasaran pembangunan ekonomi yang dirancang IMP3 terwujud. Sektor manufaktur dan layanan berkembang pesat sesuai target dan investasi besar direalisasikan di kawasan industri (Lebdioui 2022, 875).

Hal yang menjadi menarik adalah pencapaian tujuan ekonomi tersebut ternyata beriringan dengan peningkatan indikasi demokrasi di Malaysia. Indeks demokrasi Malaysia tercatat mengalami tren peningkatan dalam periode tahun 2018-2023. Dalam *Liberal Democracy Index* (LDI) yang diterbitkan oleh Varieties of Democracy (V-Dem). Indeks demokrasi Malaysia mengalami tren peningkatan yang dimulai pada tahun 2018 dengan poin 0.32, naik 11 basis poin dari tahun sebelumnya (V-Dem 2026). Kemudian kembali naik pada tahun 2019 dengan poin 0.34 dan seiring berjalannya waktu stabil di angka 0.30 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan poin 0.36 (V-Dem 2026).

Grafik 2. Indeks Demokrasi Malaysia Tahun 2015-2023



Sumber: V-Dem (2026)

Kemudian dalam *Electoral Democracy Index* (EDI) yang juga diterbitkan oleh Varieties of Democracy (V-Dem). Indeks demokrasi Malaysia juga mengalami

tren peningkatan pada tahun 2018 dengan poin 0.44, naik 11 basis poin dari tahun sebelumnya (V-Dem 2026). Indeks ini kembali naik pada tahun 2019 dengan poin 0.47 dan kemudian mengalami dinamika pada rentang tahun 2020-2022 yang disebabkan oleh terjadinya dinamika elektoral dalam politik Malaysia (V-Dem 2026). Hingga kemudian pada akhirnya mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan poin 0.51 (V-Dem 2026).

Liberal Democracy Index (LDI) memotret dua aspek penting dalam demokrasi yakni demokrasi liberal yang mencerminkan perlindungan hak individu dan demokrasi elektoral yang mencerminkan prosedur pemilihan umum (V-Dem Institute 2024, 52). Indeks tersebut kemudian didasarkan pada beberapa indikator yakni perlindungan kebebasan individu, kebebasan berserikat dan berekspresi, pemilihan yang bebas dan adil, serta *checks and balances* antar lembaga (V-Dem Institute 2024, 52).

Kemudian di sisi yang sama, *Electoral Democracy Index* (EDI) memotret aspek fundamental dalam demokrasi yakni prosedur pemilihan umum serta pemenuhan hak politik warga negara (V-Dem Institute 2024, 53). Indeks tersebut kemudian didasarkan pada beberapa indikator yakni penyelenggaraan pemilu yang bersih, bebas, dan adil, kebebasan berekspresi, ketersediaan sumber informasi alternatif, kebebasan berserikat, hak pilih bagi laki-laki dan perempuan, serta sejauh mana kebijakan pemerintah dijalankan oleh pejabat politik yang terpilih (V-Dem Institute 2024, 53).

V-Dem mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah spektrum, mulai dari *closed autocracy*, *electoral autocracy*, *grey zone*, *electoral democracy*, hingga *liberal democracy* (V-Dem Institute 2024, 12). Laporan V-Dem tahun 2024

menunjukkan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Malaysia berpindah dari yang sebelumnya *electoral autocracy* menjadi *electoral democracy* pada tahun 2023 (V-Dem Institute 2024, 40). Hal ini menunjukkan bahwa ada sebuah proses demokratisasi yang terjadi di Malaysia. Kenaikan status ini dipicu oleh momentum pemilu pasca tahun 2018 dan transisi kekuasaan yang berjalan damai pada pemilu nasional tahun 2022 (V-Dem Institute 2024, 41). Kemudian, reformasi hukum seperti pengesahan Undang-Undang Kebebasan Informasi pada tahun 2023, juga memberikan jaminan akan proses demokratisasi tersebut (V-Dem Institute 2024, 40). Temuan ini mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi Malaysia turut beriringan dengan peningkatan kualitas demokrasi di Malaysia, meski tujuan utama strategi industrialisasi Malaysia awalnya hanya bersifat ekonomi.

Third Industrial Master Plan (IMP3) memiliki signifikansi yang jauh lebih besar dalam mendorong proses demokratisasi dibandingkan dengan kebijakan ekonomi atau cetak biru industrialisasi sebelumnya. Kebijakan terdahulu, seperti *New Economic Policy* (NEP) dan *Industrial Master Plan* sebelumnya, secara inheren didesain dalam kungkungan politik etno-nasionalisme yang kental dengan tujuan utama redistribusi kekayaan antaretnis dan pemeliharaan jaringan patronase politik Melayu Bumiputera (Kinuthia 2009, 10). Akibatnya, industrialisasi awal cenderung berkarakteristik padat karya murah (*labor-intensive*) yang justru melanggengkan dependensi material rakyat terhadap subsidi negara dan keterikatan pada otoritas tradisional (Kinuthia 2009, 13).

Sebaliknya, IMP3 membawa pergeseran paradigma yang radikal dengan mengalihkan fokus nasional dari kuantitas volume modal mentah menuju kualitas investasi padat teknologi (*capital deepening*) serta diversifikasi sektor manufaktur

bernilai tambah tinggi (*high-value added*) (Mohamed et al. 2018, 18). Signifikansi IMP3 terletak pada kemampuannya memutus rantai politik patronase tersebut melalui penguatan *backward linkages* yang masif dengan sektor jasa modern domestik (Mohamed et al. 2018, 14). Melalui penciptaan lapangan kerja formal yang menuntut keterampilan tinggi (*skilled labor*), IMP3 secara mandiri berhasil mengerek naik upah median pekerja hingga ke tingkat tengah secara inklusif. Kemandirian ekonomi dan penebalan bantalan ekonomi yang dilahirkan oleh ekosistem IMP3 inilah yang secara sosiologis berhasil menetasakan kelas menengah urban baru yang terdidik dan kritis (Lee 2022, 310). Kelompok inilah yang pada akhirnya kehilangan ketergantungan materi terhadap elite penguasa dan menjelma menjadi penggerak utama tuntutan kebebasan sipil, sebuah daya dorong emansipatif yang tidak pernah mampu dilahirkan oleh model industrialisasi berbasis buruh murah pada kebijakan-kebijakan ekonomi sebelumnya (Lee 2022, 317).

Fenomena yang terjadi di Malaysia tersebut sejalan dengan Teori Modernisasi (Inglehart and Welzel 2005). Dalam perspektif ini, modernisasi dipandang sebagai suatu proses pembangunan manusia yang melampaui sekadar pertumbuhan ekonomi, karena mencakup transformasi mendalam dalam struktur sosial dan sistem nilai masyarakat (Inglehart and Welzel 2005, 120). Dalam proses modernisasi, nilai-nilai tradisional bergeser menuju menuju nilai-nilai *self-expression* yang menekankan otonomi individu (Inglehart and Welzel 2005, 131). Perubahan budaya ini membuat otonomi individu, kesetaraan gender, dan nilai-nilai demokratis menjadi lebih dominan (Inglehart and Welzel 2005, 275). Singkatnya, ketika masyarakat bergerak menuju masyarakat industri maju, pola pikir kolektif

cenderung bergeser ke arah penghargaan atas kebebasan sipil dan partisipasi politik yang lebih luas (Inglehart and Welzel 2005, 276). Oleh karena itu, proses industrialisasi Malaysia yang memperbaiki taraf ekonomi secara simultan menciptakan basis nilai sosial yang mendukung proses demokratisasi.

Bersamaan dengan proses tersebut, lanskap politik Malaysia juga mengalami dinamika yang signifikan. Isu demokratisasi semakin meningkat seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat sipil akan partisipasi politik yang lebih luas, transparansi pemerintahan yang lebih baik, dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih kuat (Ostwald and Oliver 2020, 665). Periode awal perkembangan politik Malaysia diawali dengan perubahan konfigurasi kekuatan politik dengan munculnya kekuatan oposisi yang lebih terorganisir dan peningkatan kesadaran politik di kalangan masyarakat (Y. H. Khoo 2016, 420).

Proses demokratisasi yang telah berjalan itu selanjutnya mendapat momentum politik khusus pada tahun 2018. Dalam pemilihan umum Mei 2018, koalisi Pakatan Harapan berhasil mengalahkan koalisi Barisan Nasional (BN), termasuk partai utama UMNO, yang telah berkuasa sejak kemerdekaan Malaysia (Ostwald and Oliver 2020, 667). Kejutan politik ini dipicu oleh gencarnya kesadaran publik akan skandal korupsi besar, khususnya kasus *1Malaysia Development Berhad* (1MDB) yang melibatkan mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak (Nadzri 2018, 140).

Laporan dari The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) menunjukkan bahwa 2018 merupakan momen penting bagi demokrasi Malaysia, ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan yang berkuasa saat itu, termasuk munculnya kasus korupsi 1MDB mendorong

kejatuhan BN untuk pertama kalinya (International IDEA 2020, 8). Skandal 1MDB menjadi katalisator yang mempercepat reformasi politik, sehingga proses demokratisasi yang telah berjalan mencapai puncaknya melalui perubahan rezim politik secara konstitusional (International IDEA 2020, 12).

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana strategi industrialisasi Malaysia melalui kerangka *Third Industrial Master Plan* (IMP3) berhasil mendorong terjadinya industrialisasi sehingga berkontribusi pada perubahan struktur dan nilai dalam masyarakat. Penelitian ini berupaya menjelaskan mekanisme kausal antara pembangunan ekonomi dan proses demokratisasi yang terjadi di Malaysia. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi antara industrialisasi dan transformasi nilai menjadi penting dalam menjelaskan pembangunan ekonomi politik Malaysia. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam studi ekonomi politik, khususnya dalam memahami dinamika kausalitas antara industrialisasi, perubahan nilai, dan demokratisasi.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana strategi industrialisasi *Third Industrial Master Plan* (IMP3) berkontribusi dalam proses demokratisasi Malaysia tahun 2018-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan kontribusi strategi industrialisasi *Third Industrial Master Plan* (IMP3) dalam mendorong pembangunan ekonomi Malaysia.

2. Menganalisis mekanisme kausal terkait kontribusi industrialisasi dalam proses demokratisasi Malaysia tahun 2018-2023.

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Malaysia sebagai subjek penelitian. Pemilihan Malaysia didasarkan pada posisinya sebagai negara berkembang yang telah lama menerapkan kebijakan industrialisasi yang terencana serta mengalami dinamika politik yang signifikan. Penelitian ini mencakup periode tahun 2018 hingga 2023. Pemilihan rentang waktu ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, tahun 2018 menjadi momentum penting dalam politik Malaysia, yakni terjadinya pergantian kekuasaan setelah enam dekade dominasi koalisi Barisan Nasional. Hal ini terjadi sebagai akibat dari ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan yang akhirnya membuka peluang baru bagi proses demokratisasi. Kedua, periode ini merupakan fase akhir dari implementasi *Third Industrial Master Plan* (IMP3) yang masih berdampak terhadap arah kebijakan industri Malaysia. Kemudian, tahun 2023 dipilih sebagai batas akhir penelitian karena menandai selesainya *Third Industrial Master Plan* (IMP3). Selain itu, batas akhir ini juga dipilih guna memberikan ruang untuk melihat proses demokratisasi Malaysia sekaligus menunjukkan kontribusi IMP3 sebagai strategi industrialisasi dalam periode tersebut.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni pemetaan teoretis dan pemetaan studi kasus. Dalam pemetaan teoretis, literatur mengeksplorasi bagaimana mekanisme pembangunan ekonomi berkontribusi pada

proses demokratisasi. Sementara itu, pemetaan studi kasus dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai mekanisme proses perubahan politik di Malaysia.

Tabel 1. Pemetaan Literatur Teoretis

Penulis	Konsensus	Perdebatan
Huber et al. (1993)	Mengakui adanya hubungan positif yang kuat antara pembangunan ekonomi dan demokrasi.	Pembangunan ekonomi kapitalis mengubah struktur kelas dengan memperkuat kelas buruh dan menengah melalui urbanisasi dan organisasi mandiri, sekaligus memperlemah kelas tuan tanah yang merupakan penentang utama demokrasi. Fokus utama adalah pada <i>power sharing</i> .
Van Noort (2024)	Sepakat bahwa pembangunan ekonomi (terutama industrialisasi) mendorong demokrasi karena meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat.	Menekankan bahwa industrialisasi yang berpusat pada manufaktur adalah kunci demokratisasi. Manufaktur membangun kemampuan organisasi pekerja yang dapat ditransfer dalam proses politik. Selain itu, keterkaitan rantai pasok manufaktur membuat aksi protes sangat mahal untuk ditekan oleh elite (biaya represi tinggi).
Treisman (2020)	Menyetujui bahwa pendapatan tinggi berkorelasi dengan proses demokratisasi dan mendorong kelangsungan demokrasi dalam jangka menengah hingga panjang.	Menekankan pada pendapatan (<i>income</i>) sebagai faktor struktural yang menunggu momentum tidak terduga (<i>triggers</i>). Kekayaan akan menciptakan <i>predispositions</i> (kesiapan) menuju demokrasi, namun untuk menuju tahap lanjut membutuhkan pemicu seperti krisis ekonomi, pemilu kompetitif, atau

		pergantian pemimpin guna mengaktifkan transisi.
--	--	---

Sumber: Olahan penulis bersumber dari Huber et al. (1993), Van Noort (2024), dan Treisman (2020)

Diskusi mengenai hubungan antara pembangunan ekonomi dan demokrasi dalam ketiga literatur ini berpijak pada konsensus bahwa kemajuan ekonomi memang berkorelasi positif dengan demokratisasi, namun mereka menawarkan mekanisme penjelasan yang berbeda. Huber et al. (1993) meletakkan dasar dengan pendekatan strukturalis, mereka berargumen bahwa pembangunan kapitalis secara fundamental mengubah keseimbangan kekuatan kelas (Huber et al. 1993, 75). Bagi mereka, kunci demokratisasi adalah penguatan kelas buruh dan menengah yang mampu berorganisasi, yang secara bersamaan melemahkan kelas tuan tanah yang selama ini menjadi penghambat utama demokrasi (Huber et al. 1993, 80). Fokus mereka adalah pada redistribusi kekuasaan sosial yang memungkinkan transisi politik terjadi (Huber et al. 1993, 82).

Sejalan dengan fokus pada organisasi massa, Van Noort (2024) mempertajam argumen tersebut dengan menekankan pada industrialisasi manufaktur. Van Noort berpendapat bahwa bukan sekadar kekayaan yang memicu demokrasi, melainkan struktur ekonomi manufaktur yang memberikan keterampilan organisasi kepada pekerja dan menciptakan ketergantungan ekonomi yang kompleks (Van Noort 2024, 466). Dalam mekanisme ini, demokrasi muncul karena biaya represi menjadi terlalu mahal bagi elite (Van Noort 2024, 467). Gangguan pada rantai produksi manufaktur akibat protes massa jauh lebih merugikan secara ekonomi dibandingkan jika elite memilih untuk berbagi kekuasaan (demokrasi) (Van Noort 2024, 470).

Di sisi lain, Treisman (2020) menawarkan perspektif yang lebih dinamis melalui *Conditional Modernization Theory* (Treisman 2020, 243). Berbeda dengan dua literatur sebelumnya yang fokus pada kekuatan struktur kelas atau sektor ekonomi, Treisman membedakan antara *predisposition* (kesiapan) dan *triggers* (pemicu) (Treisman 2020, 250). Dia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi memang menciptakan kondisi masyarakat yang lebih siap untuk berdemokrasi, tetapi transisi itu sendiri sering kali tidak terjadi secara otomatis (Treisman 2020, 251). Dibutuhkan pemicu spesifik seperti krisis ekonomi, pemilu kompetitif, atau pergantian pemimpin untuk mengaktifkan potensi demokrasi tersebut (Treisman 2020, 252). Secara kolektif, ketiga literatur ini menunjukkan bahwa demokrasi adalah hasil dari kesiapan struktural masyarakat, daya tawar ekonomi sektor manufaktur, dan momentum politik yang tepat.

Literatur-literatur tersebut menyediakan fondasi teoretis yang saling melengkapi terkait korelasi positif antara pembangunan ekonomi dan demokrasi. Namun, dengan fokus pada Teori Modernisasi (Inglehart and Welzel 2005), skripsi ini menempatkan industrialisasi sebagai salah satu variabel yang berkontribusi dalam proses demokratisasi.

Tabel 2. Pemetaan Literatur Studi Kasus Malaysia

Penulis	Konsensus	Perdebatan
Chong (2018)	Pemilihan Umum ke-14 (GE14) merupakan terobosan demokratis yang mengakhiri dominasi kekuasaan Barisan Nasional (BN) selama lebih dari 60 tahun.	Menitikberatkan proses demokratisasi pada mekanisme mobilisasi masyarakat sipil (Gerakan Bersih) yang secara strategis memanfaatkan peluang politik seperti skandal 1MDB dan manipulasi pemilih.

Kamaruddin and Rogers (2020)	Tahun 2018 adalah tahun penting (<i>watershed moment</i>) yang menandai pergantian partai penguasa untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan Malaysia.	Menyoroti mekanisme tekanan sosio-ekonomi dan pergeseran generasi pemilih muda yang tidak lagi terikat pada narasi perlindungan etnis tradisional.
Ostwald and Oliver (2020)	Pemilihan Umum ke-14 (GE14) mengakhiri rezim koalisi partai penguasa semi-demokratis terlama di dunia melalui proses transisi yang tidak terduga.	Proses transisi terjadi melalui mekanisme inkorporasi elite. Perpecahan elite di tubuh UMNO memungkinkan oposisi menembus basis pemilih tradisional Melayu dan Malaysia Timur.

Sumber: Olahan penulis bersumber dari Chong (2018), Kamaruddin and Rogers (2020), dan Ostwald and Oliver (2020)

Proses demokratisasi di Malaysia yang memuncak pada Pemilihan Umum ke-14 (GE14) dipahami melalui berbagai mekanisme yang saling berkaitan. Secara institusional, demokratisasi ini dipicu oleh pemanfaatan peluang politik yang muncul dari krisis legitimasi rezim Barisan Nasional, khususnya dikarenakan skandal 1MDB. Chong (2018) menjelaskan bahwa masyarakat sipil, melalui Gerakan Bersih, bertindak sebagai mekanisme penggerak utama yang mengubah frustrasi publik menjadi partisipasi kewarganegaraan yang aktif, seperti pengawasan pemilu secara mandiri dan mobilisasi massa untuk menuntut reformasi elektoral (Chong 2018, 111). Mekanisme ini secara efektif menekan ruang gerak otoritarianisme kompetitif yang selama ini memanipulasi sistem pemilihan untuk mempertahankan kekuasaan (Chong 2018, 117).

Dari perspektif elite dan politik elektoral, demokratisasi diakselerasi oleh mekanisme perpecahan elite di dalam tubuh partai penguasa yakni UMNO.

Ostwald dan Oliver (2020) berargumen bahwa transisi ini dimungkinkan karena adanya strategi inkorporasi elite, koalisi oposisi merangkul tokoh-tokoh kunci dari rezim lama untuk mendapatkan kepercayaan dari pemilih di arena-arena yang sebelumnya sulit ditembus, seperti wilayah pedesaan Melayu (Ostwald and Oliver 2020, 677). Mekanisme perpecahan elite ini memberikan jaminan keamanan bagi pemilih konservatif bahwa hak-hak identitas mereka tetap terlindungi di bawah pemerintahan baru, sehingga mengurangi risiko ketidakstabilan pasca-transisi (Ostwald and Oliver 2020, 678).

Selain faktor elite dan organisasi sipil, terdapat mekanisme perubahan sosio-demografis yang mendasari pergeseran kekuasaan ini. Kamaruddin dan Rogers (2020) mencatat bahwa tekanan ekonomi akibat kenaikan biaya hidup dan pengenalan *Goods and Services Tax* (GST) menciptakan ketidakpuasan yang luas di lintas etnis (Kamaruddin and Rogers 2020, 130). Selain itu, munculnya generasi pemilih muda yang memiliki moralitas politik berbeda, lebih kritis terhadap korupsi dan tidak terlalu terikat pada loyalitas partai tradisional, menjadi mekanisme pendorong yang mengubah peta politik Malaysia secara permanen (Kamaruddin and Rogers 2020, 135).

Berangkat dari dua pemetaan literatur diatas, terdapat celah pada penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya belum ada yang menggunakan mekanisme industrialisasi untuk menjelaskan proses demokratisasi di Malaysia. Mekanisme industrialisasi ini bukan satu-satunya proses, namun menjadi alternatif lain yang ditawarkan dalam penelitian ini. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan Teori Modernisasi (Inglehart and Welzel 2005) untuk menganalisis bagaimana

mekanisme antara industrialisasi yang berkontribusi pada peningkatan indeks demokrasi Malaysia dalam periode waktu 2018-2023.

1.6 Kerangka Pemikiran

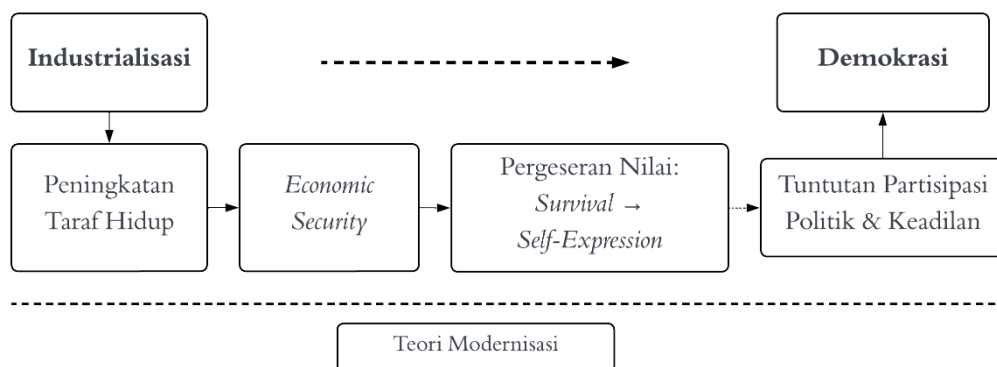
Kerangka pemikiran penelitian ini berlandaskan pada Teori Modernisasi berbasis nilai yang dikembangkan oleh Ronald Inglehart dan Christian Welzel. Teori ini memandang demokratisasi sebagai hasil dari proses transformasi sosial jangka panjang yang dipicu oleh pembangunan ekonomi (Inglehart and Welzel 2005, 16). Dalam perspektif ini, industrialisasi dipahami sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi karena mendorong peningkatan produktivitas, diversifikasi struktur ekonomi, serta perluasan kesempatan kerja di sektor-sektor bernilai tambah (Inglehart and Welzel 2005, 26). Melalui peningkatan output, pendapatan, dan stabilitas ekonomi, industrialisasi secara bertahap meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas, terutama melalui akses yang lebih besar terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan formal yang relatif stabil (Inglehart and Welzel 2005, 35).

Peningkatan taraf hidup tersebut kemudian menciptakan apa yang oleh Inglehart dan Welzel disebut sebagai *economic security*, yaitu kondisi di mana individu tidak lagi terjebak dalam ketidakpastian ekonomi yang ekstrem dan ancaman eksistensial sehari-hari (Inglehart and Welzel 2005, 112). Ketika kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pekerjaan, dan pendidikan relatif terjamin, orientasi psikologis dan kultural masyarakat mengalami pergeseran (Inglehart and Welzel 2005, 120). Individu menjadi kurang bergantung pada struktur otoritas tradisional dan lebih mampu mengembangkan preferensi yang otonom (Inglehart and Welzel 2005, 130). Pada tahap ini, nilai-nilai *survival* yang

menekankan stabilitas, kepatuhan, dan keamanan fisik mulai digantikan oleh nilai-nilai *self-expression* yang menekankan kebebasan memilih, toleransi terhadap perbedaan, kesetaraan gender, dan keinginan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka (Inglehart and Welzel 2005, 138).

Pergeseran nilai tersebut membawa implikasi politik yang signifikan. Masyarakat yang semakin berorientasi pada *self-expression* menjadi lebih sensitif terhadap isu keadilan, hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan akuntabilitas pemerintahan (Inglehart and Welzel 2005, 272). Mereka tidak hanya menginginkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menuntut agar kekuasaan dijalankan secara transparan, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan (Inglehart and Welzel 2005, 275). Dalam konteks ini, tuntutan terhadap partisipasi politik bukan sekadar instrumen untuk memperbaiki kesejahteraan material, melainkan juga ekspresi dari kebutuhan normatif akan pengakuan, martabat, dan kontrol atas arah kehidupan kolektif (Inglehart and Welzel 2005, 278).

Diagram 1. Mekanisme Kausal Kontribusi Industrialisasi dalam Demokrasi



Sumber: Olahan penulis bersumber dari Inglehart and Welzel (2005)

Dengan demikian, demokrasi dalam kerangka ini tidak dipahami sebagai akibat langsung dari industrialisasi, melainkan sebagai hasil dari sebuah proses perubahan nilai yang dipicu oleh meningkatnya keamanan ekonomi (Inglehart and Welzel 2005, 112). Industrialisasi menciptakan kondisi material yang memungkinkan perubahan orientasi nilai, perubahan nilai menciptakan tuntutan sosial baru, dan tuntutan sosial tersebut mendorong transformasi institusi politik ke arah yang lebih inklusif dan partisipatif (Inglehart and Welzel 2005, 285). Oleh karena itu, hubungan antara industrialisasi dan demokrasi bersifat tidak langsung, namun bertahap dan bersandar pada transformasi kultural sebagai jembatan kausal utama. Kerangka ini memungkinkan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana pembangunan ekonomi di Malaysia dapat berkontribusi dalam proses demokratisasi, bukan hanya melalui perubahan struktur kelas atau institusi, tetapi melalui perubahan orientasi nilai masyarakat yang membentuk preferensi politik dan perilaku partisipatif warga negara.

1.7 Argumen Sementara

Penelitian ini berargumen bahwa strategi industrialisasi Malaysia melalui kerangka *Third Industrial Master Plan* (IMP3) berkontribusi dalam proses demokratisasi Malaysia periode 2018–2023 melalui satu rangkaian mekanisme kausal utama yakni pembangunan ekonomi dan perubahan nilai, sebagaimana dijelaskan dalam Teori Modernisasi (Inglehart and Welzel 2005). Hulu dari mekanisme ini bermula dari implementasi strategi industrialisasi IMP3 yang berhasil memacu pertumbuhan nilai tambah pada sektor manufaktur strategis. Kinerja industri yang kuat dan berbasis teknologi tinggi ini mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat secara luas, yang dibuktikan oleh merangkaknya kurva PDB

per kapita berbasis *Purchasing Power Parity* (PPP) serta linearitas kenaikan upah median di bursa kerja domestik. Terdistribusinya kemakmuran ini secara bertahap menciptakan kondisi keamanan ekonomi (*economic security*) saat masyarakat terproteksi dari ketidakpastian finansial sehari-hari, yang didukung pula oleh matangnya instrumen jaminan sosial nasional Malaysia.

Terbebasnya masyarakat Malaysia dari kecemasan eksistensial materi dasar ini secara simultan memicu terjadinya pergeseran nilai, yaitu transisi dari orientasi bertahan hidup (*survival values*) menuju nilai ekspresi diri (*self-expression values*). Pergeseran nilai tersebut kemudian termanifestasi dalam munculnya gerakan dan tuntutan aktif masyarakat sipil seperti Gerakan Bersih, #Undi18, dan #Lawan yang menuntut keadilan elektoral, transparansi, serta pemberantasan korupsi sistemik. Akumulasi tekanan dari bawah tersebut akhirnya berhasil meruntuhkan sekat-sekat otoritarianisme kompetitif lama dan mendorong proses demokratisasi di Malaysia.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *process tracing*. Metode ini dipilih untuk memahami secara mendalam strategi industrialisasi Malaysia dan kaitannya dengan perubahan politik, khususnya proses demokratisasi di Malaysia. Metode ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah serta menggambarkan secara komprehensif mekanisme kausal antara pembangunan ekonomi melalui industrialisasi dan demokratisasi di Malaysia.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Malaysia. Sementara itu, objek dalam penelitian ini adalah kontribusi industrialisasi dalam proses demokratisasi

Malaysia. Objek ini dipilih untuk mengkaji secara kritis bagaimana proses industrialisasi dapat menciptakan keamanan ekonomi dan membentuk nilai-nilai politik yang berpengaruh terhadap pelebagaan demokrasi di Malaysia.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan melalui studi literatur yang bersifat primer dan sekunder. Data diperoleh dari berbagai sumber akademik dan kebijakan, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga riset, laporan statistik pemerintah Malaysia, dokumen pemerintah Malaysia, serta laporan Varieties of Democracy (V-Dem).

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data melalui studi literatur terhadap dokumen yang relevan dengan tema industrialisasi dan demokrasi di Malaysia. Setelah data terkumpul, penulis melakukan analisis *process tracing* untuk mengidentifikasi dan menguji mekanisme kausal yang menghubungkan industrialisasi dengan proses demokratisasi di Malaysia. Penulis menerapkan metode *Theory-Testing Process Tracing* untuk menguji apakah mekanisme Teori Modernisasi (Inglehart and Welzel 2005) yang dipicu oleh proses industrialisasi secara empiris berkontribusi dalam proses demokratisasi di Malaysia (Beach 2020, 12). Operasionalisasi penelitian ini dilakukan dengan memecah jalur kausalitas ke dalam enam bagian mekanisme yang saling bertautan. Mulai dari implementasi IMP3 yang memicu industrialisasi, peningkatan taraf hidup, pembentukan keamanan ekonomi, terjadinya pergeseran nilai, munculnya tuntutan partisipasi politik, hingga terjadinya proses demokratisasi di Malaysia. Hasil dari proses ini

diharapkan mampu menjawab rumusan masalah dan mendukung argumen teoretis yang diajukan dalam penelitian.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk bab-bab yang seluruhnya terdiri dari empat bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab 1 berisikan pendahuluan penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, hingga sistematika pembahasan.

Bab 2 berisikan pembahasan terkait kontribusi *Third Industrial Master Plan* (IMP3) dalam mendorong pembangunan ekonomi Malaysia.

Bab 3 berisikan pembahasan terkait transformasi kultural dan demokratisasi Malaysia tahun 2018-2023.

Bab 4 berisikan tentang pemahaman akhir dari penelitian berupa kesimpulan akan analisis mekanisme kausal yang berhasil didapat serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB 2

KONTRIBUSI *THIRD INDUSTRIAL MASTER PLAN* (IMP3) DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI MALAYSIA

Bab ini akan membahas bagaimana strategi industrialisasi *Third Industrial Master Plan* (IMP3) berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Malaysia melalui penguatan sektor manufaktur, peningkatan taraf hidup masyarakat, serta terciptanya *economic security* sebagai dampak dari proses industrialisasi. Sebagai kerangka industrialisasi jangka panjang, IMP3 dirancang untuk memperkuat daya saing ekonomi Malaysia melalui pengembangan industri manufaktur bernilai tambah tinggi, peningkatan produktivitas, serta integrasi ekonomi domestik ke dalam rantai pasok global. Implementasi kebijakan tersebut tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga mendorong transformasi sosial-ekonomi masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan perluasan lapangan kerja formal. Dalam konteks penelitian ini, pembahasan mengenai pembangunan ekonomi menjadi penting karena peningkatan kesejahteraan dan keamanan ekonomi masyarakat dipahami sebagai fondasi utama dalam proses perubahan nilai yang kemudian berkontribusi terhadap demokratisasi di Malaysia.

Untuk menjelaskan hal tersebut, bab ini dibagi ke dalam tiga subbab. Subbab pertama membahas kontribusi IMP3 terhadap kinerja sektor manufaktur Malaysia, khususnya terkait penguatan industri strategis, peningkatan ekspor, investasi, dan produktivitas ekonomi nasional. Subbab kedua membahas bagaimana perkembangan sektor manufaktur berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pertumbuhan pendapatan dan peningkatan PDB per kapita sebagai indikator kesejahteraan ekonomi. Adapun subbab terakhir

membahas mekanisme *economic security* dan perkembangan perlindungan sosial di Malaysia, termasuk peran dua instrumen jaminan sosial Malaysia seperti Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) dan Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) dalam menciptakan stabilitas ekonomi masyarakat di tengah proses modernisasi industri. Bab ini akan menunjukkan bahwa industrialisasi melalui IMP3 tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan kondisi sosial-ekonomi yang menjadi dasar penting bagi perubahan nilai dan perkembangan demokrasi di Malaysia.

2.1 Lanskap Demokrasi di Malaysia

Untuk memahami kontribusi industrialisasi terhadap peningkatan demokrasi di Malaysia, terlebih dahulu perlu dipahami karakteristik dan dinamika demokrasi Malaysia sepanjang periode penelitian. Dalam kajian politik, demokratisasi dipahami sebagai suatu proses transformasi politik yang berlangsung secara bertahap menuju sistem pemerintahan yang lebih terbuka, kompetitif, dan akuntabel (Warren 2009, 6). Demokrasi tidak dipandang sebagai kondisi yang bersifat dikotomis antara negara demokratis dan negara otoriter, melainkan sebagai suatu spektrum yang menunjukkan derajat kualitas institusi demokrasi yang dapat mengalami kemajuan maupun kemunduran seiring perubahan politik yang terjadi (V-Dem 2024). Oleh karena itu, proses demokratisasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan pemilihan umum, tetapi juga oleh peningkatan kualitas kompetisi politik, perlindungan kebebasan sipil, partisipasi masyarakat, serta akuntabilitas institusi negara (Warren 2009, 8).

Pendekatan tersebut digunakan oleh Varieties of Democracy (V-Dem) yang memandang demokratisasi sebagai suatu proses dinamis melalui kerangka

Episodes of Regime Transformation (ERT) (V-Dem 2024). Berbeda dengan pendekatan demokrasi yang bersifat biner, V-Dem mengidentifikasi perubahan rezim berdasarkan perkembangan indikator-indikator demokrasi secara bertahap, sehingga memungkinkan suatu negara mengalami peningkatan ataupun penurunan kualitas demokrasi tanpa harus mengalami perubahan rezim secara revolusioner (V-Dem 2024). Melalui pendekatan ini, transformasi politik dipahami sebagai hasil dari perubahan institusi, perilaku politik, serta meningkatnya kualitas kompetisi elektoral yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu (V-Dem 2024).

Dalam konteks tersebut, perkembangan demokrasi Malaysia menunjukkan karakteristik yang unik dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 1957, Malaysia secara konsisten menyelenggarakan pemilihan umum yang kompetitif, namun selama lebih dari enam dekade sistem politik negara didominasi oleh koalisi Barisan Nasional (BN) yang mempertahankan kekuasaannya melalui kombinasi keunggulan elektoral, patronase politik, dan penguasaan terhadap institusi negara (Kamaruddin and Rogers 2020, 130). Kondisi tersebut menyebabkan Malaysia selama bertahun-tahun diklasifikasikan sebagai *electoral autocracy*, yaitu rezim yang tetap menyelenggarakan pemilu secara berkala tetapi belum mampu menciptakan arena kompetisi politik yang sepenuhnya setara bagi seluruh peserta pemilu (V-Dem 2024). Dalam kategori ini, prosedur elektoral memang tersedia, tetapi masih terdapat berbagai hambatan terhadap oposisi, keterbatasan kebebasan sipil, serta dominasi partai pemerintah terhadap sumber daya politik dan media (Kamaruddin and Rogers 2020, 133).

Meskipun demikian, sejak pertengahan dekade 2000-an mulai terlihat perubahan bertahap dalam lanskap politik Malaysia. Meningkatnya urbanisasi, berkembangnya kelas menengah, meluasnya akses pendidikan tinggi, serta penetrasi teknologi informasi menyebabkan masyarakat Malaysia semakin kritis terhadap praktik patronase politik dan korupsi (Chong 2018, 115). Perubahan sosial tersebut kemudian diperkuat oleh munculnya berbagai gerakan masyarakat sipil, seperti gerakan BERSIH, yang secara konsisten menuntut reformasi sistem pemilu, transparansi pemerintahan, dan penguatan akuntabilitas publik (Chong 2018, 117). Berbagai dinamika tersebut menunjukkan bahwa sebelum tahun 2018, Malaysia sesungguhnya telah mengalami akumulasi tekanan sosial yang secara perlahan mengarah pada peningkatan tuntutan demokratis, meskipun belum menghasilkan perubahan rezim secara signifikan.

Momentum paling menentukan dalam proses tersebut terjadi pada Pemilihan Umum ke-14 tahun 2018. Pemilu ini menjadi titik balik dalam sejarah politik Malaysia karena untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan koalisi Barisan Nasional mengalami kekalahan dan menyerahkan kekuasaan kepada koalisi Pakatan Harapan (PH) melalui proses transisi politik yang berlangsung secara damai (Nadzri 2018, 143). Pergantian pemerintahan ini tidak hanya menandai berakhirnya dominasi politik satu partai yang telah berlangsung lebih dari enam puluh tahun, tetapi juga menunjukkan meningkatnya efektivitas mekanisme demokrasi elektoral sebagai instrumen pergantian kekuasaan (Nadzri 2018, 145). Salah satu faktor yang mempercepat perubahan tersebut adalah menguatnya ketidakpuasan publik terhadap skandal korupsi *1Malaysia Development Berhad* (1MDB) yang melibatkan pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak

(Kamaruddin and Rogers 2020, 120). Skandal tersebut memicu krisis legitimasi pemerintah, memperkuat konsolidasi oposisi, serta mendorong mobilisasi politik masyarakat dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya (Chong 2018, 111).

Dalam perspektif penelitian ini, skandal 1MDB dipahami sebagai *political catalyst* yang mempercepat proses demokratisasi, bukan sebagai penyebab utama munculnya demokrasi. Momentum politik tersebut berhasil mengakselerasi tuntutan masyarakat yang sebelumnya telah berkembang melalui perubahan sosial dan ekonomi yang berlangsung dalam jangka panjang (Chong 2018, 120). Dengan kata lain, keberhasilan oposisi memenangkan pemilu tahun 2018 tidak hanya dipengaruhi oleh faktor politik sesaat, tetapi juga oleh perubahan struktur masyarakat yang semakin mandiri secara ekonomi, lebih berpendidikan, dan semakin kritis terhadap kualitas tata kelola pemerintahan (Nadzri 2018, 135).

Momentum politik seperti skandal 1MDB dan Pemilu 2018 memang menjadi pemicu langsung perubahan rezim, namun proses tersebut berlangsung di atas fondasi sosial-ekonomi yang telah dibangun melalui industrialisasi selama lebih dari satu dekade (Mohamed et al. 2018, 13). Implementasi *Third Industrial Master Plan* (IMP3) berhasil memperkuat sektor manufaktur, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kelas menengah perkotaan, serta menciptakan *economic security* yang menjadi prasyarat bagi perubahan orientasi nilai masyarakat (Mohamed et al. 2018, 15). Meningkatnya keamanan ekonomi memungkinkan masyarakat mengalihkan perhatian dari pemenuhan kebutuhan dasar menuju tuntutan yang lebih besar terhadap kebebasan sipil, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi politik (Chong 2018, 122). Oleh karena itu, peningkatan demokratisasi Malaysia pada periode 2018–2023 tidak dapat dipahami

semata-mata sebagai konsekuensi dari perubahan politik elektoral, melainkan sebagai hasil kumulatif dari transformasi ekonomi dan sosial yang telah berlangsung secara gradual sejak implementasi IMP3.

2.2 Kontribusi IMP3 terhadap Kinerja Sektor Manufaktur Malaysia

Third Industrial Master Plan (IMP3) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Malaysia dalam mendorong transformasi ekonomi menuju struktur industri yang lebih maju dan berdaya saing global (Ministry of Investment, Trade and Industry Malaysia 2006, 11). Kebijakan ini dirancang oleh Ministry of International Trade and Industry Malaysia (MITI) sebagai kelanjutan dari dua rencana induk industri sebelumnya, dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah serta daya saing industri nasional. IMP3 bertujuan memperkuat posisi Malaysia dalam ekonomi global dengan menempatkan sektor manufaktur sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), ekspor, investasi, serta produktivitas tenaga kerja (Ministry of Investment, Trade and Industry Malaysia 2006, 132). Dalam kerangka tersebut, sektor manufaktur tidak hanya dipandang sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen transformasi struktural yang mampu mendorong modernisasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Rasiah et al. 2024, 29).

Kebijakan industrialisasi dalam IMP3 menekankan pengembangan industri bernilai tambah tinggi serta diversifikasi struktur produksi nasional (Ministry of Investment, Trade and Industry Malaysia 2006, 153). Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada industri berbasis sumber daya alam seperti pengolahan kelapa sawit,

karet, dan kayu, tetapi juga memberikan perhatian besar pada pengembangan sektor manufaktur yang tidak berbasis pada sumber daya (*non-resource-based industries*) seperti elektronik dan listrik, otomotif, mesin dan peralatan, serta produk teknologi tinggi lainnya (Rasiah et al. 2024, 31). Pengembangan sektor-sektor tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing ekspor Malaysia sekaligus menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi yang membutuhkan keterampilan teknis dan teknologi yang lebih maju (Asian Development Bank 2025, 42). Selain itu, IMP3 juga mengintegrasikan kebijakan peningkatan teknologi, penguatan kapasitas inovasi, serta pengembangan sumber daya manusia sebagai upaya menarik Penanaman Modal Asing (*Foreign Direct Investment*) yang berperan sebagai katalis utama dalam proses industrialisasi (Ministry of Investment, Trade and Industry Malaysia 2006, 153).

Salah satu pendekatan utama yang digunakan dalam IMP3 adalah integrasi industri domestik ke dalam rantai pasok global. Pemerintah Malaysia mendorong perusahaan lokal untuk tidak hanya beroperasi sebagai produsen domestik, tetapi juga menjadi bagian dari jaringan produksi regional dan internasional (Rasiah 2010, 305). Integrasi ini dilakukan melalui peningkatan standar produksi, peningkatan kualitas produk, serta penyesuaian terhadap standar teknologi global (Ho et al. 2016, 40). Dengan menjadi bagian dari rantai pasok global, perusahaan domestik memperoleh akses terhadap teknologi baru, praktik manajemen modern, serta peluang pasar internasional yang lebih luas (Rasiah et al. 2024, 33). Strategi ini secara signifikan meningkatkan kapasitas industri Malaysia untuk bersaing di pasar global sekaligus meningkatkan produktivitas sektor manufaktur secara keseluruhan (Ho et al. 2016, 54).

Selain integrasi global, IMP3 juga menekankan penguatan klaster industri sebagai strategi meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor manufaktur. Pengembangan klaster industri bertujuan menciptakan ekosistem industri yang terintegrasi secara geografis dan fungsional (Ministry of Investment, Trade and Industry Malaysia 2006, 235). Perusahaan-perusahaan dalam sektor yang sama atau terkait dapat saling memanfaatkan teknologi dan tenaga kerja secara lebih efektif (Ho et al. 2016, 41). Contoh nyata dari kebijakan ini adalah pengembangan klaster elektronik di Penang yang berkembang menjadi pusat produksi semikonduktor dan komponen elektronik di kawasan Asia Tenggara (Wahyuni et al. 2012, 37). Saat ini, Penang memiliki lebih dari 350 perusahaan multinasional yang didukung oleh lebih dari 3.000 usaha kecil dan menengah terkait manufaktur (Wahyuni et al. 2012, 40). Data juga menunjukkan pada tahun 2019, Penang menguasai sekitar 5% ekspor semikonduktor global (Liang and Lean 2024, 37). Keberadaan klaster industri ini memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan, efisiensi produksi, serta peningkatan kolaborasi antara perusahaan, lembaga penelitian, dan pemerintah (Liang and Lean 2024, 39). Hal ini pada akhirnya meningkatkan produktivitas industri dan memperkuat daya saing sektor manufaktur Malaysia dalam ekonomi global.

IMP3 juga memberikan perhatian besar pada pengembangan teknologi dan penelitian (*research and development*). Pemerintah Malaysia menyediakan berbagai insentif bagi perusahaan yang melakukan inovasi teknologi, pengembangan desain produk, serta investasi dalam kegiatan produksi (Malaysian Investment Development Authority 2021, 30). Kebijakan ini bertujuan mengurangi ketergantungan industri domestik terhadap teknologi impor dan mendorong

pengembangan kapasitas inovasi nasional (Malaysian Investment Development Authority 2021). Melalui investasi dalam teknologi dan riset, sektor manufaktur Malaysia mampu menghasilkan produk dengan nilai tambah tinggi serta meningkatkan efisiensi produksi melalui penggunaan teknologi canggih dan otomatisasi industri (Narayanan and Yew-Wah 2018, 144). Peningkatan kapasitas teknologi ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas tenaga kerja serta mendorong transformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan (Narayanan and Yew-Wah 2018, 150).

Pengembangan sumber daya manusia merupakan komponen penting lainnya dalam kebijakan IMP3. Pemerintah Malaysia menyadari bahwa keberhasilan industrialisasi sangat bergantung pada ketersediaan tenaga kerja terampil yang mampu mengoperasikan teknologi modern dan beradaptasi dengan perubahan industri global. Oleh karena itu, IMP3 menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program *Technical and Vocational Education and Training* (TVET) (Amin et al. 2023, 110). Program TVET dirancang untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri manufaktur berteknologi tinggi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan daya saing industri nasional (Amin et al. 2023, 113).

Untuk mendukung pengembangan sektor manufaktur, pemerintah Malaysia juga menjalankan berbagai program dan kebijakan konkret. Salah satu kebijakan utama yang dilakukan adalah pemberian insentif fiskal untuk mendorong investasi di sektor manufaktur bernilai tambah (Malaysian Investment Development Authority 2018a, 22). Program *Pioneer Status* memberikan pembebasan pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam industri strategis atau memproduksi barang

dengan nilai tambah tinggi (Malaysian Investment Development Authority 2018b, 22). Selain itu, pemerintah Malaysia juga menyediakan *Investment Tax Allowance* bagi perusahaan yang melakukan investasi modal dalam teknologi baru, otomatisasi produksi, atau peningkatan kapasitas industri (Malaysian Investment Development Authority 2018, 23). Kebijakan insentif ini bertujuan untuk menarik investasi domestik dan asing serta mempercepat modernisasi sektor manufaktur (Malaysian Investment Development Authority 2018a, 30).

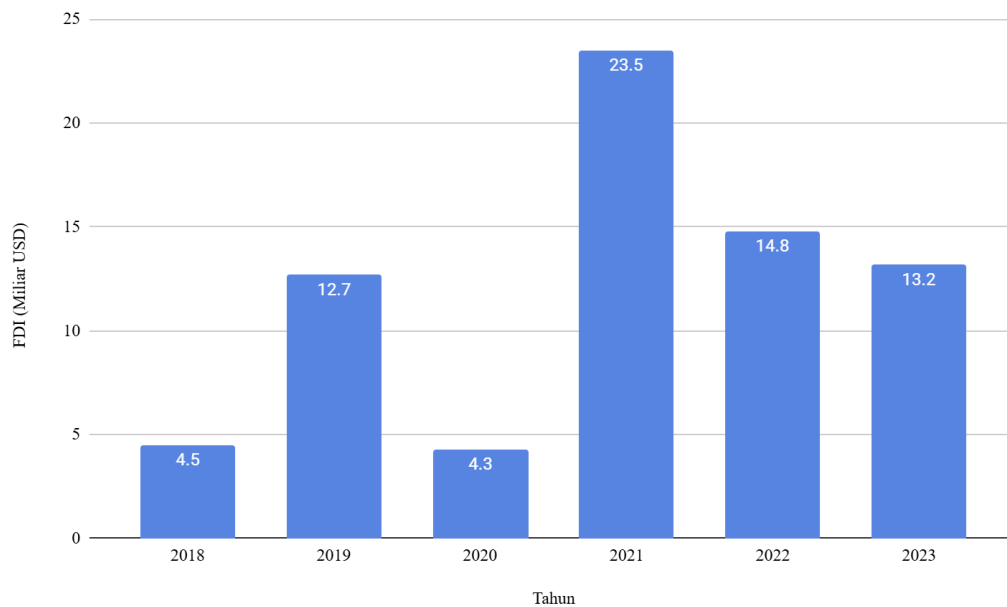
Selain insentif fiskal, pemerintah Malaysia juga mengembangkan kawasan industri khusus yang dilengkapi dengan infrastruktur modern untuk mendukung kegiatan manufaktur berteknologi tinggi. Pengembangan kawasan seperti Kulim Hi-Tech Park merupakan bagian dari strategi untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan menarik perusahaan multinasional untuk menanamkan modalnya di Malaysia (Leh 2015, 129). Kawasan industri tersebut menyediakan fasilitas produksi, infrastruktur logistik, serta dukungan teknologi yang memungkinkan perusahaan meningkatkan efisiensi produksi dan mempercepat inovasi (R. Abidin et al. 2014, 4). Keberadaan kawasan industri ini juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi regional dan penciptaan lapangan kerja (Leh 2015, 133).

IMP3 juga mencakup program bantuan teknis bagi perusahaan domestik, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM) terkait manufaktur, melalui *Industrial Technical Assistance Fund* (ITAF) (Ministry of Investment, Trade and Industry Malaysia 2006, 156). Program ini bertujuan membantu UKM manufaktur meningkatkan kualitas produk, memenuhi standar internasional, serta meningkatkan daya saing di pasar ekspor (Munoz et al. 2015, 679). Dengan adanya

dukungan teknis dan finansial, UKM manufaktur dapat meningkatkan kapasitas produksi dan berintegrasi dalam rantai pasok global (Hashim 2011, 37). Penguatan UKM manufaktur merupakan bagian penting dari strategi industrialisasi karena sektor ini berperan sebagai pemasok utama dalam ekosistem industri nasional dan berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja (Hashim 2011, 40). Selain itu, pemerintah Malaysia juga melaksanakan program pengembangan merek nasional melalui kampanye “*Made in Malaysia*” untuk meningkatkan kepercayaan pasar global terhadap produk manufaktur domestik (Lew and Sulaiman 2014, 40). Program ini bertujuan memperkuat identitas industri nasional dan meningkatkan reputasi produk Malaysia di pasar internasional (Lew and Sulaiman 2014, 43).

Keberhasilan sektor manufaktur sebagai motor industrialisasi di bawah kerangka *Third Industrial Master Plan* (IMP3) tidak dapat dipisahkan dari peran arus masuk Penanaman Modal Asing (*Foreign Direct Investment*). Di bawah koridor kebijakan IMP3, pemerintah Malaysia secara sengaja mendesain berbagai insentif fiskal dan penataan ekosistem industri yang kondusif untuk menarik modal global, khususnya pada sektor-sektor manufaktur bernilai tambah tinggi seperti industri Elektronik dan Elektrik (E&E), kimia, dan teknologi canggih (Rasiah et al. 2024, 30). FDI bertindak sebagai mesin penggerak utama yang mentransformasi kapasitas teknologi dan skala produksi industri domestik menjadi bernilai tinggi (Seyoum 2024, 193).

Grafik 3. Nilai Arus Masuk *Foreign Direct Investment* (FDI) Sektor Manufaktur Malaysia Tahun 2018-2023



Sumber: Malaysian Investment Development Authority (2024)

Mekanisme IMP3 dalam mendorong transformasi industri nasional Malaysia terlihat dari dominasi aliran investasi asing yang secara spesifik mengalir ke sektor manufaktur. Pada tahun 2018, *Foreign Direct Investment* (FDI) di sektor manufaktur tercatat sebesar \$4,5 miliar, sebelum melonjak drastis menjadi \$12,7 miliar pada tahun 2019 karena berhasil menyerap pengalihan rantai pasok global dari China (Malaysian Investment Development Authority 2024, 30). Meskipun sempat terkoreksi ke angka \$4,3 miliar pada tahun 2020 akibat pembatasan pandemi, sektor ini mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah Malaysia pada tahun 2021 dengan menarik FDI sebesar \$23,5 miliar (Malaysian Investment Development Authority 2024, 38).

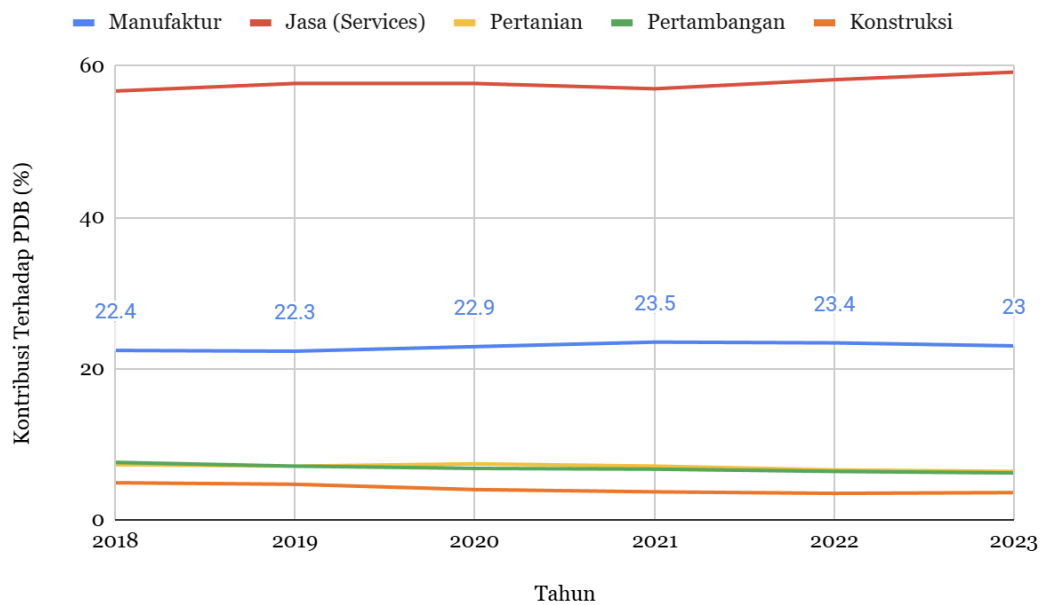
Meskipun arus masuk FDI sektor manufaktur Malaysia tampak melandai pada tahun 2022 dan 2023, yakni menjadi sebesar \$14,8 miliar dan \$13,2 miliar, dinamika ini tidak mengindikasikan adanya degradasi daya tarik investasi nasional

Malaysia (Malaysian Investment Development Authority 2024, 43). Penurunan moderat tersebut sejatinya merupakan fase normalisasi pasca-anomali ekonomi, di mana lonjakan fantastis pada tahun 2021 merupakan hasil dari akumulasi investasi global yang sempat tertahan selama pandemi (*pent-up investment*) (Yunus and Abdullah 2022, 58). Di samping itu, melandainya nilai nominal FDI pada rentang 2022–2023 juga dipengaruhi oleh rem darurat belanja modal korporasi global akibat *tech downcycle* (Yunus and Abdullah 2022, 60).

Dalam koridor strategi IMP3, pengetatan nilai ini justru merefleksikan pergeseran taktis pemerintah Malaysia yang mulai selektif menyaring masuknya modal asing. Malaysia mulai mengalihkan fokus dari kuantitas volume modal mentah menuju kualitas investasi padat teknologi (*capital deepening*), seperti ekosistem kendaraan listrik (EV) dan semikonduktor tingkat lanjut (Lu and Moorthy 2026, 179). Melalui mekanisme inilah, strategi industrialisasi IMP3 secara tidak langsung memaksa terjadinya pembentukan upah riil yang tinggi dan inklusif di internal industri manufaktur, yang pada akhirnya mentransmisikan surplus ekonomi secara langsung ke masyarakat Malaysia (N. Z. Abidin et al. 2022, 95).

Kinerja sektor manufaktur yang kuat dalam periode implementasi IMP3 menunjukkan bahwa sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai salah satu komponen ekonomi, tetapi juga sebagai motor utama pembangunan ekonomi Malaysia. Penempatan manufaktur sebagai sektor unggulan didasarkan pada kemampuannya menghasilkan nilai tambah yang tinggi (*high value-added production*), meningkatkan produktivitas ekonomi, serta mempercepat pergeseran struktur ekonomi dari basis komoditas menuju ekonomi berbasis industri dan teknologi (Zang 2009, 25).

Grafik 4. Persentase Kontribusi Sektor terhadap PDB Malaysia Tahun 2018-2023



Sumber: Department of Statistics Malaysia (2024)

Kontribusi sektor manufaktur yang mencapai sekitar 23% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan bahwa sektor ini menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional (Department of Statistics Malaysia 2024a). Meskipun persentasenya lebih rendah dari sektor jasa, sektor manufaktur menghasilkan limpahan produktivitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan sektor jasa.

Tabel 3. Perbandingan Rasio Efisiensi Investasi (*Incremental Capital-Output Ratio*) Sektor Manufaktur dan Jasa Malaysia Tahun 2018-2023

Tahun	ICOR Sektor Manufaktur	ICOR Sektor Jasa
2018	3.8	4.2
2019	4.1	4.5
2020	- 6.5	- 4.2
2021	4.3	4.8
2022	3.6	3.9
2023	3.9	4.1

Sumber: Department of Statistics Malaysia (2024)

Semakin rendah angka ICOR, maka semakin tinggi efisiensi investasi di suatu negara atau sektor (Wai 1985, 227). Data menunjukkan sektor manufaktur Malaysia memiliki nilai ICOR yang lebih rendah daripada sektor jasa, hal ini berarti setiap unit modal yang diinvestasikan di sektor manufaktur menghasilkan pertumbuhan output yang lebih besar (Wai 1985, 230). Efisiensi yang tinggi di sektor manufaktur inilah yang akan menghasilkan surplus ekonomi yang lebih besar yang kemudian bisa didistribusikan (Kaldor 1968, 388). Sektor manufaktur yang bersifat padat modal memungkinkan peningkatan produktivitas tenaga kerja (Shahidul and Shazali 2011, 667). Meski butuh modal besar di awal, sektor ini menciptakan pekerjaan yang membutuhkan skill tinggi, yang berujung pada gaji yang lebih besar dan stabil bagi masyarakat (Shahidul and Shazali 2011, 669). Sebagai catatan, nilai ICOR negatif pada tahun 2020 merupakan anomali statistik akibat pandemi COVID-19 (Department of Statistics Malaysia 2024d). Hal ini terjadi bukan karena investasi tidak efisien, melainkan karena output PDB

menyusut drastis akibat pembatasan aktivitas ekonomi berskala besar, sementara di sisi yang sama investasi fisik yang sudah berjalan tidak bisa ditarik kembali.

Sektor manufaktur juga berperan sebagai *engine of growth*, hal ini dapat terjadi karena sektor manufaktur tidak hanya bergerak dan tumbuh sendiri (Hauge 2023, 48). Sektor manufaktur memaksa sektor lain seperti jasa untuk ikut bergerak mengikuti kecepatan produksi manufaktur guna melengkapi kebutuhan produksi (Hauge 2023, 50). Sektor manufaktur memiliki *backward linkages* dan *forward linkages* yang sangat kuat (Hauge 2023, 57). Dalam lanskap ekonomi politik Malaysia di bawah koridor IMP3, kedua keterkaitan struktural ini bekerja secara simultan, dengan penekanan krusial pada kokohnya *backward linkages* industri. Ketika arus FDI menyuntik sektor manufaktur teknologi tinggi seperti Elektronik dan Elektrik (E&E), industri ini secara agresif menarik sektor jasa domestik, seperti logistik, pusat data, utilitas, dan layanan teknik lokal, untuk melengkapi kebutuhan rantai produksinya (Rasiah 2010, 318). Kecepatan dan standar efisiensi tinggi yang diterapkan oleh pabrik-pabrik manufaktur memaksa sektor jasa pendukung ini untuk ikut meningkatkan produktivitasnya. Melalui mekanisme *backward linkages* inilah, surplus ekonomi yang dihasilkan oleh sektor manufaktur berhasil ditransmisikan secara inklusif ke sektor non-manufaktur (Hauge 2023, 53).

Hubungan timbal balik yang luas ini menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) yang memperkuat dampak ekonomi secara menyeluruh (UNIDO 2025, 4). Hal tersebut mencerminkan peran manufaktur dalam menciptakan output ekonomi yang signifikan melalui aktivitas produksi bernilai tinggi, khususnya dalam industri elektronik, mesin, dan peralatan transportasi. Selain itu, tingkat pertumbuhan tahunan sektor manufaktur yang relatif stabil, yakni sekitar 6%,

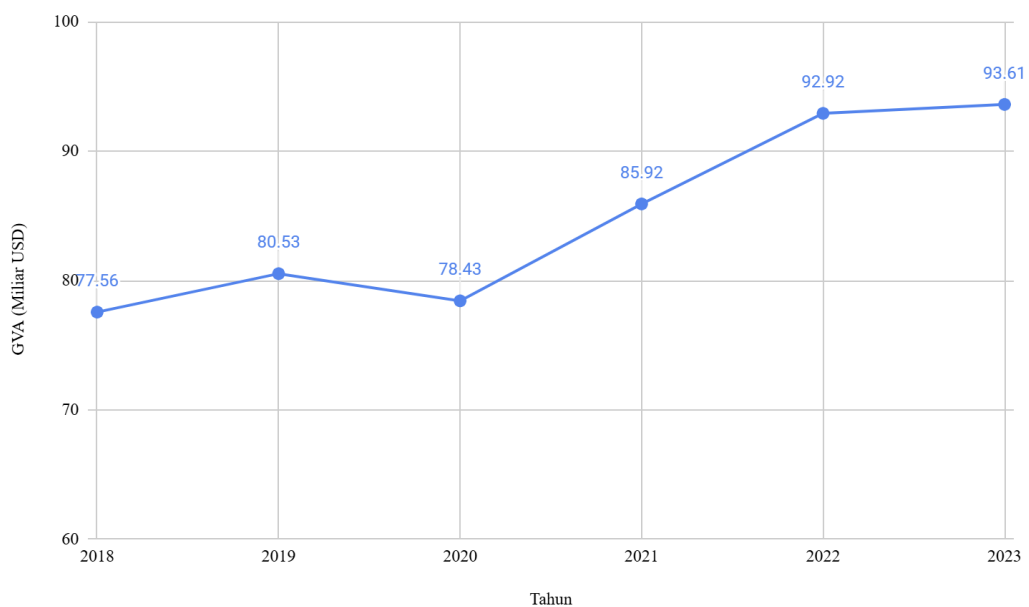
menunjukkan bahwa kebijakan industrialisasi melalui IMP3 berhasil menciptakan basis pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan resilien terhadap fluktuasi ekonomi global (Department of Statistics Malaysia 2024).

Kontribusi manufaktur terhadap ekspor nasional juga memperkuat posisi sektor ini sebagai pendorong utama integrasi Malaysia ke dalam ekonomi global. Dominasi ekspor manufaktur yang mencapai lebih dari 80% dari total ekspor nasional menunjukkan bahwa struktur perdagangan Malaysia telah mengalami transformasi signifikan dari ekspor berbasis komoditas primer menuju ekspor produk industri bernilai tambah tinggi (Department of Statistics Malaysia 2024). Secara lebih spesifik, produk seperti *machinery and transport equipment* serta *miscellaneous manufactured articles* menjadi komponen utama dalam struktur ekspor Malaysia (Department of Statistics Malaysia 2024). Sektor-sektor ini memiliki karakteristik teknologi tinggi dan intensitas modal yang besar, sehingga mampu meningkatkan daya saing global Malaysia serta memperluas partisipasinya dalam *global value chains*. Laporan IMF juga menunjukkan bahwa kontribusi barang manufaktur terhadap total ekspor domestik tetap dominan hingga periode 2023, dengan proporsi yang melebihi 55% (IMF 2024). Kondisi ini menunjukkan keberhasilan strategi IMP3 dalam mendorong diversifikasi ekspor, meningkatkan kompleksitas industri, serta memperkuat posisi Malaysia sebagai negara industri berbasis ekspor di kawasan Asia Tenggara (T. Martin et al. 2021, 90).

Selain kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, sektor manufaktur juga memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja nasional. Penyerapan sekitar 17% tenaga kerja nasional oleh sektor manufaktur menunjukkan bahwa sektor ini menjadi sumber

utama pekerjaan formal dengan tingkat produktivitas yang relatif tinggi (Department of Statistics Malaysia 2024). Berbeda dengan sektor berbasis komoditas tradisional, industri manufaktur, terutama subsektor berteknologi tinggi, membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan teknis dan pendidikan yang lebih tinggi (Chataway and Wield 2000, 809). Kondisi ini mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, pendidikan vokasi, dan pengembangan keterampilan industri (Chataway and Wield 2000, 811). Dengan demikian, pertumbuhan sektor manufaktur tidak hanya meningkatkan output ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat, mobilitas sosial, dan pembentukan kelas menengah industri yang menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi jangka panjang (Su and Yao 2017, 50).

Grafik 5. *Gross Value Added (GVA)* Sektor Manufaktur Malaysia Tahun 2018-2023



Sumber: Department of Statistics Malaysia (2024)

Peningkatan nilai tambah manufaktur selama periode IMP3 menunjukkan adanya peningkatan kapasitas produksi serta kompleksitas struktur industri

Malaysia. Data menunjukkan bahwa nilai tambah manufaktur terus mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2021 nilai tambah sektor manufaktur mencapai sekitar US\$ 85,92 miliar dan meningkat menjadi sekitar US\$ 92,92 miliar pada 2022 (Department of Statistics Malaysia 2024c). Peningkatan ini mencerminkan ekspansi kapasitas produksi nasional, peningkatan efisiensi industri, serta keberhasilan kebijakan pemerintah dalam mendorong investasi teknologi, otomatisasi produksi, dan inovasi industri. Secara struktural, pertumbuhan nilai tambah tersebut menunjukkan bahwa Malaysia tidak hanya meningkatkan volume produksi, tetapi juga berhasil meningkatkan kualitas dan kompleksitas produk manufakturnya, yang berimplikasi pada peningkatan produktivitas ekonomi secara keseluruhan (Kaldor 1968, 387).

Lebih jauh, dominasi sektor manufaktur dalam struktur ekonomi Malaysia juga menunjukkan adanya efek pengganda (*multiplier effect*) yang luas terhadap sektor-sektor lain dalam perekonomian (Wong and Kee 2022, 15). Pertumbuhan industri manufaktur mendorong perkembangan sektor jasa pendukung seperti logistik, transportasi, keuangan, dan layanan teknis, sehingga menciptakan keterkaitan antar sektor yang memperkuat struktur ekonomi nasional (Wong and Kee 2022, 17). Selain itu, peningkatan aktivitas industri juga mendorong investasi domestik dan asing, memperluas basis pajak negara, serta meningkatkan pendapatan pemerintah yang kemudian dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan sosial (Wong and Kee 2022, 22). Dengan demikian, perkembangan sektor manufaktur tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara langsung, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan ekonomi secara menyeluruh.

Tabel 4. Simpulan Kontribusi IMP3 terhadap Sektor Manufaktur Malaysia (2018-2023)

Indikator Kinerja Manufaktur	Titik awal (2018)	Puncak/Capaian Akhir (2023)	Pola Pertumbuhan & Implikasi Struktural
Arus Masuk FDI Manufaktur	\$4,5 Miliar USD	\$13,2 Miliar USD	Mencapai rekor tertinggi \$23,5 Miliar pada 2021. Menandakan keberhasilan akumulasi modal global dan strategi <i>capital deepening</i> .
Kontribusi PDB Nasional	22,4%	23,0%	Konsisten stabil sebagai penopang ekonomi makro dan bertindak sebagai engine of growth bagi sektor jasa pendukung
<i>Gross Value Added</i> (GVA)	\$77,56 Miliar USD	\$93,61 Miliar USD	Mengalami tren pendakian konstan yang membuktikan peningkatan kapasitas teknologi dan kompleksitas produk ekspor.

Sumber: Olahan penulis dari Malaysian Investment Development Authority (2024) dan Department of Statistics Malaysia (2024)

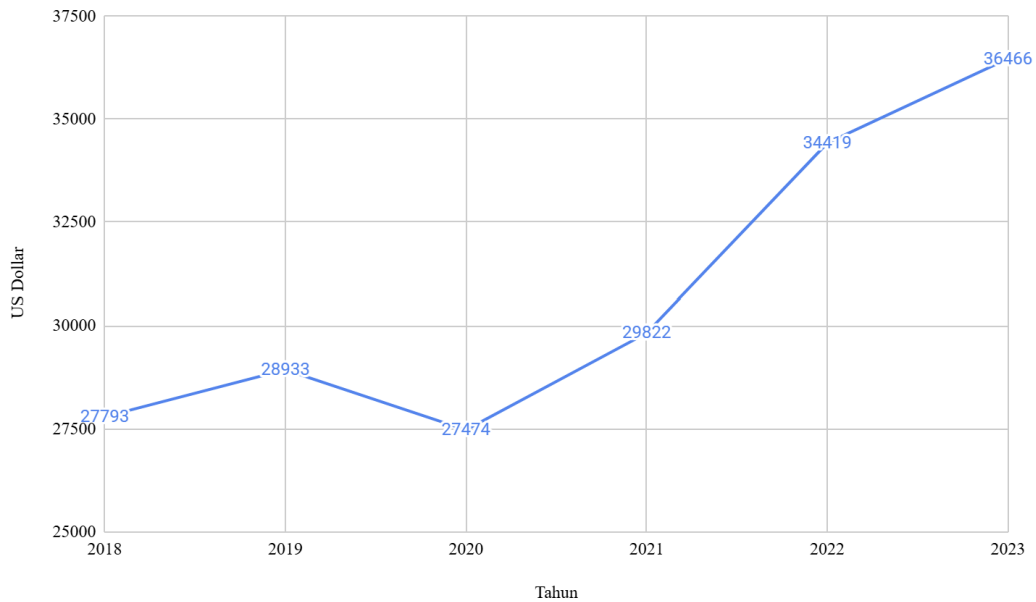
Perkembangan sektor manufaktur selama periode IMP3 menunjukkan bahwa kebijakan industrialisasi Malaysia berhasil memperkuat basis produksi nasional, meningkatkan daya saing global, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Kontribusi signifikan sektor manufaktur terhadap PDB, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja menegaskan peran strategis sektor ini sebagai mesin utama pembangunan ekonomi Malaysia (T. Martin et al. 2021, 90).

Peningkatan nilai tambah industri, ekspansi kapasitas produksi, serta integrasi ke dalam rantai pasok global menunjukkan bahwa IMP3 tidak hanya meningkatkan kinerja ekonomi jangka pendek, tetapi juga mendorong transformasi struktural ekonomi menuju sistem produksi yang lebih kompleks, modern, dan berbasis teknologi (Su and Yao 2017, 50). Dengan demikian, keberhasilan sektor manufaktur di bawah kebijakan IMP3 menjadi fondasi penting bagi peningkatan taraf hidup masyarakat dan pembangunan ekonomi Malaysia secara berkelanjutan.

2.3 Sektor Manufaktur sebagai Pendorong Peningkatan Taraf Hidup

Salah satu indikator dalam mengukur dampak industrialisasi terhadap kesejahteraan masyarakat adalah melalui PDB per kapita berbasis *Purchasing Power Parity* (PPP). Data historis menunjukkan PDB per kapita (PPP) Malaysia mengalami kenaikan selama periode IMP3. Angka PPP Malaysia yang terus mendaki secara konsisten dari US\$ 27.793 pada tahun 2018 hingga menembus US\$ 36.466 pada tahun 2023 membuktikan adanya lonjakan daya beli riil yang signifikan di tingkat domestik (World Bank 2026b). Peningkatan akumulatif ini sangat krusial karena menunjukkan bahwa kemampuan daya beli riil masyarakat Malaysia dalam memenuhi kebutuhan hidup di dalam negeri semakin kuat dan setara dengan standar negara maju, melampaui fluktuasi nilai tukar mata uang nominal di pasar valuta asing (Asian Development Bank 2025). Terbebasnya masyarakat dari jerat kecemasan materi dasar inilah yang menjadi prasyarat runtuhnya nilai-nilai bertahan hidup (*survival values*) (Inglehart and Welzel 2005, 136).

Grafik 6. PDB Per Kapita, PPP (Current International \$) Malaysia Tahun 2018-2023

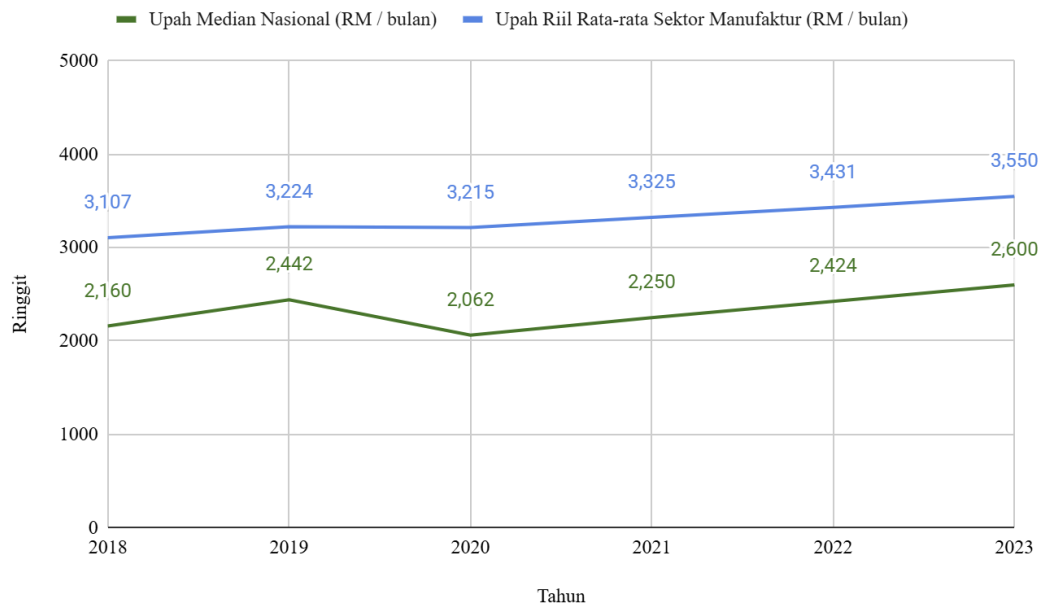


Sumber: World Bank (2026)

Penebalan lapisan ekonomi masyarakat tersebut tidak dinikmati secara eksklusif oleh kelompok elite, melainkan terdistribusi secara adil ke lapisan pekerja menengah ke bawah, hal ini didukung secara empiris oleh indikator upah median nasional Malaysia. Pada tahun 2018, upah median Malaysia berada di angka RM 2.160 per bulan dan berhasil merangkak naik hingga menyentuh RM 2.600 per bulan pada tahun 2023 (World Bank 2026b). Penggunaan metrik median menjadi sangat penting dalam penelitian ini karena memotong bias ketimpangan ekstrem dan menunjukkan bahwa 50% populasi pekerja di level tengah benar-benar mengalami perbaikan pendapatan yang nyata. Meskipun sempat terjadi hantaman hebat akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang menekan upah median turun hingga mencapai -15,5%, ketangguhan struktur ekonomi Malaysia terbukti mampu melakukan rebound cepat pada tahun-tahun berikutnya untuk

mengembalikan tren kesejahteraan masyarakat ke jalur positif (Department of Statistic Malaysia 2026).

Grafik 7. Upah Median Nasional dan Upah Riil Rata-Rata Sektor Manufaktur Malaysia Tahun 2018-2023

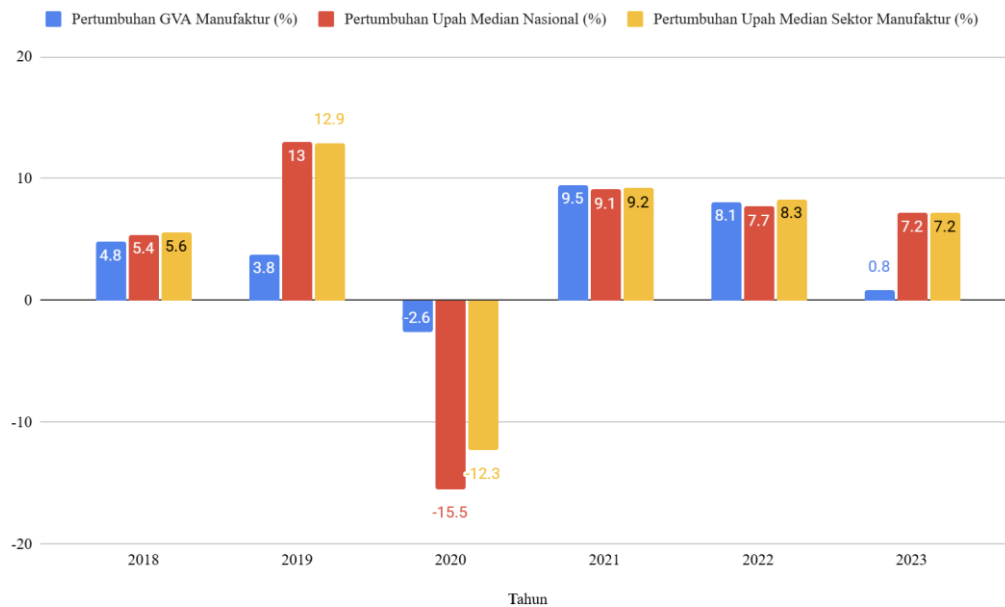


Sumber: Department of Statistic Malaysia (2026)

Aktor utama di balik resiliensi upah dan peningkatan taraf hidup tersebut adalah dinamika positif upah riil rata-rata sektor manufaktur. Sepanjang periode 2018-2023 secara konsisten upah riil rata-rata sektor manufaktur terus bergerak naik dari RM 3.107 di tahun 2018 hingga mencapai RM 3.550 pada tahun 2023 (Department of Statistic Malaysia 2026). Sektor industri padat modal ini bertindak sebagai penyedia lapangan kerja berkualitas tinggi yang menawarkan stabilitas pendapatan serta jaminan sosial yang kokoh bagi masyarakat luas (Przywara 2019, 97). Selain itu, bukti lain bahwa sektor manufaktur bertindak sebagai jangkar kesejahteraan masyarakat Malaysia terlihat dari pola persentase pertumbuhan

tahunannya yang bergerak beriringan secara linear dengan persentase pertumbuhan upah median nasional (Przywara 2019, 98).

Grafik 8. Perbandingan Persentase Pertumbuhan *Gross Value Added* (GVA) Manufaktur, Pertumbuhan Upah Median Nasional, dan Pertumbuhan Upah Median Sektor Manufaktur (2018-2023)



Sumber: Department of Statistic Malaysia (2026)

Pada tahun 2018, sinkronisasi awal terekam dalam pertumbuhan ekonomi sektor manufaktur sebesar 4,8% yang berjalan beriringan dengan kenaikan upah median nasional di angka 5,4% (Department of Statistic Malaysia 2026). Namun, anomali terjadi pada tahun 2019, ketika *Gross Value Added* (GVA) manufaktur mengalami perlambatan moderat ke angka 3,8%, sedangkan indikator upah median nasional justru melonjak drastis hingga menyentuh angka 13,0% (Department of Statistic Malaysia 2026). Fenomena lonjakan upah yang tidak proporsional dengan pertumbuhan output fiskal di tahun 2019 ini dipahami sebagai efisiensi modal kumulatif dari implementasi IMP3 tahun-tahun sebelumnya (Sevcenko et al. 2022,

356). Industri manufaktur Malaysia yang semakin matang dan efisien berhasil menciptakan surplus ekonomi yang masif, yang kemudian didistribusikan kepada kelas pekerja menyusul adanya intervensi kebijakan ketenagakerjaan yang progresif pasca-perubahan politik tahun 2018 (Sevcenko et al. 2022, 358).

Keunggulan sektor manufaktur sebagai *engine of growth* juga terlihat jelas pada fase pemulihan ekonomi pasca pandemi di tahun 2021. Sektor manufaktur melakukan *rebound* ekspansif yang luar biasa dengan mencatat lonjakan *Gross Value Added* (GVA) sebesar 9,5%, hal ini beriringan secara linear dengan upah median nasional yang juga mencatat pertumbuhan sebesar 9,1% (Department of Statistic Malaysia 2026). Tren sinkronisasi ini terus berlanjut hingga tahun 2022, pertumbuhan sektor manufaktur yang bergerak di angka 8,1% kembali beriringan secara harmonis dengan kenaikan upah median sebesar 7,7% (Department of Statistic Malaysia 2026). Meskipun pada tahun 2023 *Gross Value Added* (GVA) sektor manufaktur melambat menjadi 0,8% akibat *tech downcycle global*, upah median nasional justru tetap naik di angka 7,2% (Department of Statistic Malaysia 2026).

Fenomena ini tidak serta-merta menggugurkan peran manufaktur sebagai konduktor ekonomi, melainkan menandakan adanya pergeseran mekanisme transmisi dari jalur kuantitas volume produksi ke jalur kualitas produktivitas (Przywara 2019, 90). Perlambatan output pada tahun 2023 direspons oleh industri manufaktur Malaysia melalui strategi penyerapan investasi besar-besaran (*capital deepening*) untuk otomatisasi industri tingkat lanjut (Przywara 2019, 85). Transisi menuju industri padat modal (*capital-intensive*) ini secara sistematis menggeser kebutuhan lapangan kerja domestik dari tenaga kerja murah menjadi tenaga kerja

ahli (*skilled labor*) yang menuntut standar kompensasi lebih tinggi (Wong and Kee 2022, 27).

Kemampuan sektor manufaktur untuk mengerek naik upah median dan mempertahankan struktur upah yang tinggi, menegaskan bahwa surplus keuntungan industri tidak mengendap di tingkat elite korporasi, melainkan langsung ditransmisikan secara inklusif kepada para pekerja di lapisan tengah (Haraguchi et al. 2017, 295). Pola pergerakan yang searah antara pertumbuhan output industri dan pertumbuhan upah ini menjadi bukti bahwa sektor manufaktur bertindak sebagai konduktor utama yang mentransmisikan surplus ekonomi langsung ke kantong masyarakat (Haraguchi et al. 2017, 297).

Sinkronisasi data ini menjustifikasi bahwa produktivitas tinggi di dalam sektor manufaktur adalah hulu utama yang mengalirkan kemakmuran ke hilir ekonomi masyarakat. Ketika pendapatan median masyarakat berada di atas biaya hidup rata-rata (*living wage*), surplus sisa uang dari pendapatan tersebut menciptakan kebebasan memilih bagi individu (Haraguchi et al. 2017, 299). Masyarakat tidak lagi menghabiskan seluruh upah mereka hanya untuk bertahan hidup (*survival values*), melainkan memiliki sisa kapital untuk dialokasikan pada investasi pendidikan tinggi, konsumsi teknologi informasi, dan partisipasi dalam ruang sosial yang lebih luas (Haraguchi et al. 2017, 301). Kemampuan daya beli riil yang resilien inilah yang bertindak sebagai pemotong kecemasan material dasar masyarakat Malaysia, melepaskan mereka dari ketergantungan bantuan tunai pemerintah, dan mengonversi stabilitas material tersebut menjadi fondasi psikologis bagi lahirnya kelas menengah kritis yang berorientasi pada nilai ekspresi diri (Inglehart and Welzel 2005, 140).

2.4 *Economic Security* dan Perlindungan Sosial di Malaysia

Secara konseptual, *economic security* merujuk pada kondisi di mana individu dan rumah tangga memiliki akses yang stabil dan berkelanjutan terhadap sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, serta memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai risiko ekonomi tanpa mengalami penurunan kesejahteraan yang signifikan (Inglehart and Welzel 2005, 150). Dalam konteks Malaysia, *economic security* tidak hanya berkaitan dengan tingkat pendapatan, tetapi juga mencakup stabilitas pekerjaan, akses terhadap perlindungan sosial, serta keberadaan mekanisme institusional yang mampu mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, *economic security* menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari industrialisasi benar-benar terdistribusi secara efektif dan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif Teori Modernisasi Inglehart dan Welzel, meningkatnya *economic security* memiliki implikasi politik yang signifikan terhadap perkembangan demokrasi (Inglehart and Welzel 2005, 231). Ketika individu hidup dalam kondisi ekonomi yang stabil dan tidak lagi sepenuhnya terfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, orientasi nilai masyarakat secara bertahap akan bergeser dari *survival values* menuju *self-expression values* (Inglehart & Welzel 2005, 233). Masyarakat yang memiliki tingkat keamanan ekonomi lebih tinggi cenderung lebih berani mengekspresikan aspirasi politik, menuntut perlindungan hak-hak sipil, serta mendorong pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel (Inglehart & Welzel 2005, 235).

Pembangunan ekonomi yang didorong oleh strategi IMP3 telah membuka peluang kerja formal yang lebih luas, terutama di sektor manufaktur, serta meningkatkan pendapatan rumah tangga secara bertahap (Rasiah et al. 2015, 79). Selain itu, industrialisasi yang terjadi Malaysia juga mendorong peningkatan pendapatan negara yang pada gilirannya memungkinkan pemerintah Malaysia untuk mengembangkan dan memperkuat berbagai program perlindungan sosial (Rasiah et al. 2015, 80). Keberhasilan industrialisasi tidak hanya diukur dari peningkatan output ekonomi atau ekspor, tetapi juga dari sejauh mana hasil pembangunan tersebut mampu memberikan rasa aman secara ekonomi bagi masyarakat luas, khususnya dalam menghadapi risiko seperti kehilangan pekerjaan, kecelakaan kerja, atau ketidakpastian di masa tua (Naudé and Szirmai 2012, 30).

Salah satu instrumen utama dalam menciptakan *economic security* di Malaysia adalah keberadaan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). KWSP merupakan skema tabungan wajib yang dirancang untuk menjamin keamanan finansial jangka panjang bagi pekerja, khususnya di sektor swasta yang tidak memiliki sistem pensiun formal seperti pegawai negeri (Wai 2016, 13). Melalui mekanisme kontribusi berkala dari pekerja dan pemberi kerja, dana yang terkumpul dalam KWSP berfungsi sebagai tabungan pensiun yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah masa produktif berakhir (Wai 2016, 15).

Dalam konteks industrialisasi IMP3, peran KWSP menjadi sangat penting karena transformasi ekonomi menuju sektor manufaktur bernilai tambah tinggi menuntut tenaga kerja untuk beradaptasi dengan keterampilan baru dan mobilitas pekerjaan yang lebih dinamis. Dengan adanya jaminan finansial jangka panjang melalui KWSP, tenaga kerja memiliki rasa aman untuk berinvestasi dalam

pengembangan keterampilan dan berpartisipasi aktif dalam sektor industri modern. Selain itu, KWSP juga berperan dalam mencegah terjadinya kemiskinan di usia tua (*old-age poverty*), sehingga memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan sepanjang siklus hidup individu (Rabi et al. 2019, 31). Dana yang dihimpun oleh KWSP juga diinvestasikan kembali dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk infrastruktur dan proyek pembangunan, yang secara tidak langsung mendukung ekosistem industri dan pertumbuhan ekonomi nasional (Rabi et al. 2019, 28).

Selain perlindungan jangka panjang melalui KWSP, Malaysia juga memiliki sistem perlindungan sosial yang memberikan jaminan terhadap risiko ekonomi jangka pendek dan menengah melalui Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO). PERKESO menyediakan berbagai skema perlindungan yang dirancang untuk melindungi pekerja dari risiko yang berkaitan dengan aktivitas kerja, seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat pekerjaan, serta ketidakmampuan permanen (Samsuddin and Ismail 2018, 22). Melalui Skim Bencana Pekerjaan dan Skim Keilatan, pekerja yang mengalami kecelakaan atau kehilangan kemampuan bekerja mendapatkan kompensasi dalam bentuk layanan medis dan tunjangan tunai (Samsuddin and Ismail 2018, 24). Perlindungan ini menjadi sangat krusial dalam konteks sektor manufaktur yang memiliki tingkat risiko kerja relatif lebih tinggi dibandingkan sektor lain, terutama pada industri yang melibatkan mesin berat dan proses produksi kompleks. Dengan adanya jaminan tersebut, pekerja tidak sepenuhnya menanggung beban risiko ekonomi akibat kecelakaan kerja, sehingga meningkatkan stabilitas pendapatan rumah tangga dan memperkuat rasa aman dalam bekerja (Samsuddin and Ismail 2018, 27).

Kombinasi antara pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh industrialisasi dan penguatan sistem perlindungan sosial menunjukkan bahwa Malaysia telah membangun fondasi *economic security* yang relatif kuat. Program KWSP dan PERKESO, tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi dengan menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam menghadapi risiko ekonomi. Dengan adanya *economic security* yang memadai, masyarakat memiliki kapasitas yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, meningkatkan produktivitas, serta beradaptasi dengan perubahan struktural yang dihasilkan oleh proses industrialisasi (Inglehart and Welzel 2005, 250). Oleh karena itu, *economic security* menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa manfaat dari kebijakan IMP3 tidak hanya tercermin dalam indikator makroekonomi, tetapi juga dirasakan secara nyata oleh masyarakat luas dalam kehidupan sehari-hari.

BAB 3

TRANSFORMASI KULTURAL DAN DEMOKRATISASI MALAYSIA

TAHUN 2018–2023

Bab ini akan membahas bagaimana proses pembangunan ekonomi yang dihasilkan melalui industrialisasi Malaysia berkontribusi terhadap perkembangan demokratisasi Malaysia pada periode 2018–2023. Jika pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa implementasi *Third Industrial Master Plan* (IMP3) berhasil mendorong pertumbuhan sektor manufaktur, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta menciptakan *economic security*, maka bab ini berfokus pada konsekuensi sosial-politik yang muncul sebagai hasil dari transformasi ekonomi tersebut. Dalam perspektif Teori Modernisasi yang dikembangkan oleh Ronald Inglehart dan Christian Welzel, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan akan mendorong perubahan orientasi nilai dalam masyarakat. Ketika kebutuhan material dasar semakin terpenuhi dan tingkat keamanan ekonomi meningkat, masyarakat cenderung mengalami pergeseran dari orientasi *survival values* menuju *self-expression values*, yaitu nilai-nilai yang lebih menekankan kebebasan individu, partisipasi politik, keadilan, serta tuntutan terhadap institusi pemerintahan yang lebih demokratis dan akuntabel. Dalam konteks Malaysia, perubahan tersebut menjadi penting untuk menjelaskan mengapa periode 2018–2023 ditandai dengan dinamika politik yang menunjukkan peningkatan kualitas demokrasi dibandingkan periode sebelumnya.

Untuk menjelaskan proses tersebut, bab ini dibagi ke dalam tiga subbab yang menggambarkan tahapan perubahan sosial dan politik yang terjadi di Malaysia. Subbab pertama membahas pergeseran nilai masyarakat Malaysia

sebagai konsekuensi dari meningkatnya kesejahteraan ekonomi dan keamanan eksistensial yang dihasilkan dari proses industrialisasi. Pembahasan ini berfokus pada perubahan orientasi masyarakat dari nilai-nilai yang berpusat pada pemenuhan kebutuhan dasar menuju nilai yang menekankan kebebasan, otonomi individu, dan kualitas hidup. Subbab kedua membahas bagaimana perubahan nilai tersebut termanifestasi dalam munculnya tuntutan masyarakat sipil terhadap reformasi politik, transparansi pemerintahan, dan akuntabilitas institusi negara, termasuk berkembangnya gerakan sosial dan meningkatnya partisipasi publik dalam ruang politik. Adapun subbab terakhir membahas perkembangan peningkatan demokratisasi Malaysia pada periode 2018–2023 dengan melihat perubahan indikator demokrasi, dinamika reformasi politik pasca Pemilu 2018, serta bagaimana perubahan sosial yang terjadi sebelumnya berkontribusi terhadap penguatan praktik-praktik demokrasi di Malaysia. Secara keseluruhan, bab ini bertujuan menunjukkan bahwa demokratisasi Malaysia bukan semata-mata hasil dari momentum politik sesaat, melainkan merupakan bagian dari proses transformasi sosial yang secara gradual dibentuk oleh pembangunan ekonomi dan modernisasi yang telah berlangsung sebelumnya.

3.1 Pergeseran Nilai Masyarakat Malaysia

Pembangunan ekonomi Malaysia selama periode IMP3 telah menciptakan kondisi keamanan eksistensial yang semakin kuat di tengah masyarakat. Dalam kerangka Teori Modernisasi (Inglehart and Welzel 2005), keamanan eksistensial merupakan kondisi ketika individu tidak lagi hidup dalam kecemasan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar seperti pekerjaan, pangan, dan stabilitas ekonomi (Inglehart & Welzel 2005, 138). Ketika masyarakat merasa bahwa kebutuhan

ekonominya relatif aman, orientasi hidup mereka mulai bergeser dari sekadar mempertahankan keberlangsungan hidup menuju pencarian kualitas hidup yang lebih baik (Inglehart & Welzel 2005, 140). Dalam konteks Malaysia, pertumbuhan PDB per kapita berbasis *Purchasing Power Parity* (PPP) yang meningkat secara konsisten sejak implementasi IMP3 menunjukkan adanya peningkatan taraf hidup masyarakat. Selain itu, peningkatan upah median dan perluasan lapangan kerja formal di sektor manufaktur memperkuat stabilitas ekonomi rumah tangga dan menciptakan rasa aman terhadap masa depan ekonomi.

3.1.1 Kondisi Survival Values Masyarakat Malaysia

Berdasarkan Teori Modernisasi (Inglehart and Welzel 2005), *survival values* merupakan orientasi nilai yang berkembang pada masyarakat yang masih menghadapi tingkat keamanan eksistensial (*existential security*) yang rendah. Pada tahap ini, individu cenderung memusatkan perhatian pada pemenuhan kebutuhan material dasar, seperti pekerjaan, pendapatan, keamanan fisik, dan stabilitas ekonomi, karena kebutuhan-kebutuhan tersebut dipandang sebagai prasyarat utama bagi keberlangsungan hidup (Inglehart and Welzel 2005, 245). Dalam kondisi ini, masyarakat akan lebih mengutamakan nilai-nilai yang menjamin keteraturan sosial, kepatuhan terhadap otoritas, serta stabilitas politik dibandingkan kebebasan individu atau partisipasi politik. Dengan demikian, *survival values* mencerminkan orientasi masyarakat yang masih menempatkan kebutuhan dasar sebagai prioritas utama sehingga aspirasi terhadap demokrasi dan hak-hak sipil belum menjadi tuntutan yang dominan (Inglehart and Welzel 2005, 250).

Dalam konteks historis politik-ekonomi Malaysia, orientasi *survival values* dapat ditemukan pada periode sebelum hasil-hasil pembangunan ekonomi dari industrialisasi mulai dirasakan secara luas oleh masyarakat. Meskipun Malaysia telah mengalami pertumbuhan ekonomi sejak dekade 1980-an, pada tahap awal transformasi industri sebagian besar masyarakat masih bergantung pada sektor-sektor dengan produktivitas yang relatif rendah dan menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap pekerjaan berkualitas tinggi (Martin 2014, 422). Ketidakpastian ekonomi tersebut menyebabkan masyarakat lebih memprioritaskan stabilitas pendapatan dan jaminan pekerjaan dibandingkan tuntutan terhadap reformasi politik. Dalam situasi seperti ini, hubungan antara negara dan masyarakat dibangun melalui pola patronase politik, pemerintah memperoleh legitimasi dengan menyediakan berbagai bentuk manfaat ekonomi, seperti subsidi, bantuan sosial, serta peluang pekerjaan melalui kebijakan pembangunan (Martin 2014, 430). Selama negara mampu menjaga pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan material masyarakat, tuntutan terhadap transparansi pemerintahan, akuntabilitas politik, maupun kebebasan sipil relatif belum menjadi prioritas utama dalam preferensi politik masyarakat (Rasiah et al. 2024, 30).

Orientasi tersebut tercermin dalam dominannya praktik politik patronase yang selama beberapa dekade menjadi salah satu karakteristik utama sistem politik Malaysia di bawah pemerintahan koalisi Barisan Nasional (BN) (Martin 2014, 423). Ketergantungan masyarakat terhadap berbagai program pembangunan dan distribusi sumber daya negara menciptakan hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat yang berlandaskan pertukaran manfaat ekonomi dengan dukungan politik (Martin 2014, 425). Dalam kondisi ketika kebutuhan dasar

masih menjadi perhatian utama, masyarakat cenderung menoleransi berbagai kelemahan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk praktik korupsi, pembatasan kebebasan media, maupun ketimpangan dalam kompetisi politik (Martin 2014, 433). Fenomena ini sejalan dengan argumen Inglehart dan Welzel bahwa masyarakat yang masih berada pada tahap survival values umumnya memberikan prioritas lebih besar pada ketertiban (*order*), keamanan (*security*), dan stabilitas ekonomi daripada kebebasan politik (*freedom*) atau partisipasi demokratis (Inglehart and Welzel 2005, 267).

Kondisi tersebut juga didukung oleh temuan World Values Survey (WVS) Wave 6 yang menunjukkan bahwa orientasi nilai masyarakat Malaysia pada awal dekade 2010-an masih didominasi oleh kelompok *materialist*, yakni sebesar 38,6% dari responden (WVS 2012). Dominasi orientasi materialis ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih memberikan prioritas pada isu-isu yang berkaitan dengan keamanan ekonomi, stabilitas sosial, dan pertumbuhan pendapatan dibandingkan nilai-nilai yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi, partisipasi politik, atau perlindungan hak-hak sipil. Dengan kata lain, preferensi politik masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mempertahankan kesejahteraan material, sehingga kualitas demokrasi belum menjadi tuntutan utama.

3.1.2 Kebangkitan Self-Expression Values di Masyarakat Malaysia

Meningkatnya *economic security* akan mengubah orientasi nilai masyarakat dari *survival values* menuju *self-expression values*. Pergeseran ini terjadi ketika pembangunan ekonomi mampu mengurangi ketidakpastian hidup yang selama ini mendominasi preferensi individu (Inglehart and Welzel 2005, 269). Dalam kondisi ketika kebutuhan material dasar telah relatif terpenuhi dan risiko ekonomi dapat

diminimalkan, masyarakat tidak lagi mengalokasikan sebagian besar energi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sebaliknya, individu mulai memberikan perhatian yang lebih besar terhadap aspek-aspek nonmaterial, seperti kebebasan individu, kualitas hidup, kesetaraan, partisipasi politik, dan perlindungan hak-hak sipil (Inglehart and Welzel 2005, 286).

Sektor manufaktur memainkan peran penting dalam menciptakan kondisi tersebut karena menyediakan pekerjaan formal yang relatif stabil, terutama di kawasan industri perkotaan seperti Penang, Selangor, dan Johor (Karim and Ahmad 2012, 108). Berbeda dengan sektor informal yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi, pekerjaan di sektor manufaktur memberikan pendapatan tetap, akses terhadap perlindungan sosial, serta peluang mobilitas sosial yang lebih tinggi (Karim and Ahmad 2012, 111). Kehadiran jaminan sosial ini mengurangi tingkat kerentanan ekonomi masyarakat dan memperkuat rasa aman individu terhadap risiko masa depan (Samsuddin and Ismail 2018, 22). Dalam jangka panjang, kondisi tersebut menciptakan perubahan psikologis kolektif di mana masyarakat tidak lagi sepenuhnya berfokus pada kebutuhan material dasar, melainkan mulai memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kebebasan individu, kualitas institusi publik, dan partisipasi politik.

Tabel 5. *World Value Survey Post Materialist Index*

Kategori Indeks Komposit (Y002)	WVS 2012 (%)	WVS 2018 (%)	Tren
<i>Materialist</i>	38.6	28	Masyarakat yang hanya berfokus pada ketertiban negara dan inflasi berkurang drastis.
<i>Mixed</i>	54.9	64.5	Menandakan fase transisi besar, di mana mayoritas massa mulai mengadopsi nilai-nilai kebebasan.
<i>Post-Materialist</i>	5.6	7.5	Lapisan masyarakat emansipatif substantif semakin menebal.

Sumber: World Value Survey (2012, 2018)

Bukti paling kokoh mengenai adanya transformasi kultural di Malaysia terekam pada pergeseran angka *Post-Materialist Index* yang dikeluarkan oleh World Value Survey (WVS). Mengacu pada tesis pembangunan manusia Inglehart dan Welzel, ketika sebuah negara berhasil membangun fondasi material yang stabil, prioritas masyarakat secara otomatis akan bergeser dari urusan bertahan hidup (*survival*) menuju ekspresi diri (*self-expression*). Data WVS mengonfirmasi mekanisme kausalitas ini dengan menunjukkan kelompok masyarakat Malaysia yang dikategorikan sebagai *Materialist* murni mengalami penurunan drastis sebesar 10,6%, dari yang semula 38,6% pada tahun 2012 menjadi 28,0% pada tahun 2018 (WVS 2012, 2018). Sebaliknya, lonjakan signifikan justru terjadi pada kelompok *Mixed* (Campuran) yang tumbuh dari 54,9% menjadi 64,5%, dibarengi dengan

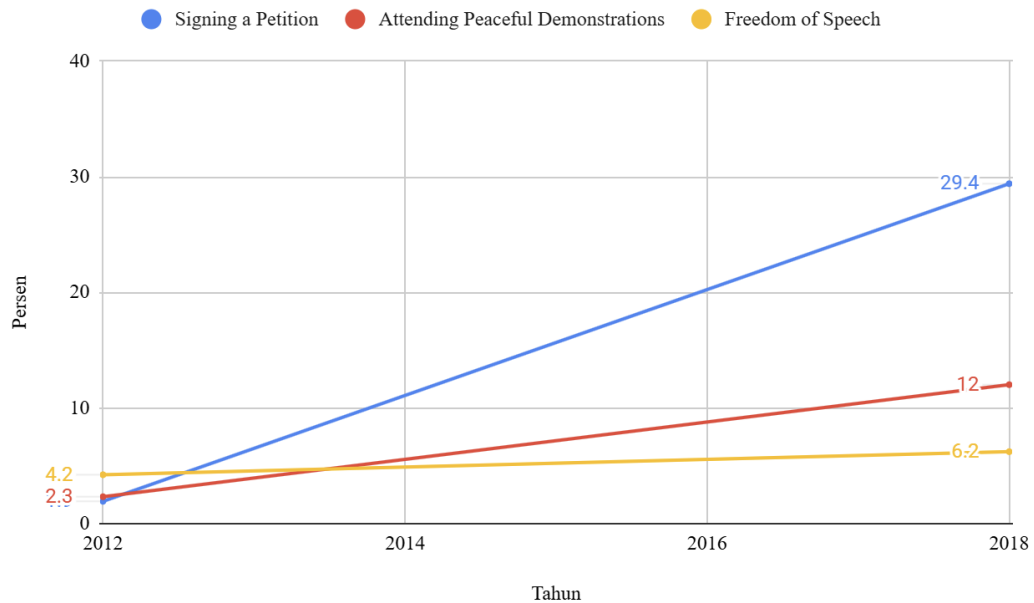
penebalan pada kelompok *Post-Materialist* murni sebesar 7,5% (WVS 2012, 2018). Fenomena dominasi kelompok *Mixed* dan *Post-Materialist* ini mencerminkan bahwa mayoritas masyarakat Malaysia telah melampaui kecemasan eksistensial dasar (WVS 2018). Mereka tidak lagi hanya menuntut ketertiban nasional atau sekadar pengendalian harga barang, melainkan sudah mulai mengadopsi nilai-nilai pasca-materi, yaitu tuntutan untuk memiliki andil dalam pengambilan keputusan pemerintah serta perlindungan terhadap kebebasan sipil (WVS 2018).

Transformasi nilai internal di tingkat individu pada akhirnya mengkristal menjadi perilaku politik aktif di ruang publik, yang menjelaskan mengapa dalam rentang tahun 2018–2023 muncul berbagai gerakan tuntutan masyarakat. Data WVS merekam lonjakan masif pada indikator partisipasi politik non-konvensional masyarakat Malaysia. Pada tahun 2012, masyarakat Malaysia yang mengaku pernah menandatangani petisi (*signing a petition*) berada pada angka yang sangat rendah, yaitu 1,9% (WVS 2012). Namun, pada tahun 2018, angka ini melesat luar biasa hingga menyentuh 29,4% (WVS 2018). Tren serupa juga terlihat pada kesediaan menghadiri demonstrasi damai (*attending peaceful demonstrations*) yang meningkat dari hanya 2,3% pada gelombang survey tahun 2012 menjadi 12,0% pada gelombang survey tahun 2018 (WVS 2012, 2018).

Lonjakan statistik yang eksponensial ini mematahkan asumsi bahwa masyarakat Malaysia adalah massa yang pasif dan submisif terhadap penguasa. Keberanian sipil untuk terlibat dalam aksi petisi elektronik dan turun ke jalan secara damai menunjukkan bahwa modal sosial dan kesadaran emansipatif massa telah matang (G. C. Khoo 2022, 76). Masyarakat tidak lagi menggantungkan aspirasi mereka pada saluran formal kepartaian yang sering kali korup, melainkan memilih

menggunakan hak kebebasan personal mereka untuk melakukan tekanan langsung (Khoo 2022, 83).

Grafik 9. Tren Persentase Kenaikan Indikator Perubahan Nilai



Sumber: World Value Survey (2012, 2018)

Indikator terakhir yang mengkonfirmasi validitas perubahan nilai budaya ini adalah meningkatnya urgensi publik terhadap kebebasan sipil (WVS 2018). Ketika responden dihadapkan pada pilihan mutlak mengenai hal paling krusial bagi masa depan bangsa, kelompok masyarakat Malaysia yang memprioritaskan melindungi kebebasan berbicara (*protecting freedom of speech*) sebagai agenda utama merangkak naik dari 4,2% (2012) menjadi 6,2% (2018) (WVS 2012, 2018). Walaupun secara persentase terlihat kecil karena harus bersaing dengan urgensi stabilitas ekonomi dan ketertiban nasional, pertumbuhan ini menunjukkan arah perubahan yang linier dengan penguatan nilai *post-material*. Peningkatan ini membuktikan bahwa bagi lapisan kelas menengah baru Malaysia, kebebasan

berekspresi bukan lagi sebuah kemewahan sekunder, melainkan sebuah kebutuhan dasar yang setara dengan keamanan material (Mohiuddin 2024, 225).

Meningkatnya keamanan ekonomi masyarakat Malaysia turut memengaruhi perubahan pola hubungan politik antara negara dan masyarakat. Dalam masyarakat dengan tingkat keamanan ekonomi rendah, hubungan politik cenderung dibangun melalui patronase, yaitu ketergantungan masyarakat terhadap bantuan material dari elite politik sebagai sarana mempertahankan stabilitas hidup (N. Martin 2014, 427). Namun, ketika industrialisasi meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi individu, ketergantungan tersebut secara perlahan mulai berkurang (Kniivilä 2007, 300). Masyarakat yang memiliki pekerjaan stabil dan tingkat pendidikan lebih tinggi menjadi lebih independen secara ekonomi sehingga tidak lagi sepenuhnya bergantung pada politik patronase atau distribusi bantuan negara untuk mempertahankan kesejahteraan hidup mereka (Kniivilä 2007, 301).

Perubahan tersebut mendorong terjadinya dekonstruksi terhadap nilai-nilai tradisional yang sebelumnya menekankan stabilitas dan kepatuhan terhadap otoritas politik. Masyarakat mulai bergeser dari orientasi *survival values* menuju *self-expression values*, yakni nilai yang menempatkan kebebasan individu, partisipasi politik, dan keadilan sosial sebagai aspek penting dalam kehidupan publik (Inglehart and Welzel 2005, 215). Dalam konteks Malaysia, pergeseran ini terlihat dari meningkatnya perhatian publik terhadap isu-isu seperti korupsi, transparansi pemerintahan, reformasi institusi, dan kebebasan sipil (G. C. Khoo 2022, 77). Jika sebelumnya isu ekonomi seperti subsidi dan stabilitas harga menjadi fokus utama masyarakat, maka pada periode pasca-2018 tuntutan terhadap pemerintahan yang

bersih dan akuntabel menjadi semakin dominan dalam diskursus publik (Kamaruddin and Rogers 2020, 130).

Gambar 1. World Value Survey Q112 (*Perception of Corruption*)

	TOTAL	Sex		Age		
		Male	Female	Up to 29	30-49	50 and more
1 There is no corruption in my country	0.9	0.5	1.4	1.2	0.7	0.9
2	0.6	0.5	0.8	0.5	0.9	0.3
3	1.4	1.1	1.7	1.2	1.1	2.0
4	1.7	2.3	1.1	1.9	1.8	1.1
5	9.1	7.8	10.5	8.8	10.5	7.4
6	8.6	8.8	8.4	8.1	8.3	9.7
7	11.7	11.3	12.2	12.6	11.2	11.4
8	18.6	18.1	19.1	22.4	18.0	14.8
9	14.9	14.8	14.9	18.1	12.9	14.0
10 There is abundant corruption in my country	32.5	35.0	30.0	25.1	34.4	38.5
Don't know	-	-	-	-	-	-
No answer	-	-	-	-	-	-
Missing; Not available	-	-	-	-	-	-
(N)	(1,313)	(657)	(656)	(419)	(543)	(351)
Mean	8.00	8.12	7.88	7.88	7.99	8.16
Std Dev.	2.00	1.93	2.07	1.95	2.04	2.01
Base mean	(1,313)	(657)	(656)	(419)	(543)	(351)

Sumber: World Value Survey (2018)

Data yang dirilis oleh World Value Survey mengenai persepsi korupsi di Malaysia menunjukkan bahwa rata-rata penilaian masyarakat Malaysia terkait dengan korupsi di negaranya berada pada angka yang sangat tinggi, yaitu 8.00 secara keseluruhan (WVS 2018). Angka rata-rata sebesar 8.00 ini secara statistik menegaskan adanya konsensus kolektif yang kuat di kalangan masyarakat Malaysia bahwa korupsi merupakan problem yang sangat masif dan sistemik di Malaysia. Lebih jauh lagi, jika data ini dibedah lebih lanjut, kelompok responden yang memilih angka 10 (korupsi akut) mendominasi secara mutlak dengan persentase mencapai 32.5% dari total populasi sampel (WVS 2018). Tingginya konsentrasi persepsi pada angka ekstrem ini membuktikan bahwa sentimen antipati terhadap penyalahgunaan kekuasaan telah menjadi kesadaran umum yang mengakar di tingkat akar rumput (WVS 2018).

Perubahan nilai ini juga berkaitan dengan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas tata kelola pemerintahan. Ketika masyarakat mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi tertentu, mereka cenderung tidak lagi hanya menilai pemerintah berdasarkan kemampuan menyediakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berdasarkan kemampuan menjamin keadilan, transparansi, dan perlindungan hak-hak sipil (G. C. Khoo 2022, 82). Dengan demikian, industrialisasi Malaysia secara tidak langsung menghasilkan transformasi budaya politik yang memperkuat tuntutan terhadap demokratisasi dan reformasi institusional.

Modernisasi ekonomi melalui industrialisasi juga berkontribusi terhadap peningkatan akses pendidikan dan lahirnya generasi baru yang lebih terdidik. Pertumbuhan sektor manufaktur dan meningkatnya pendapatan rumah tangga memungkinkan lebih banyak masyarakat Malaysia mengakses pendidikan tinggi dan pelatihan profesional (Rasiah et al. 2023, 49). Dalam jangka panjang, kondisi ini mendorong terbentuknya kelas menengah yang memiliki tingkat literasi politik lebih tinggi dan lebih terbuka terhadap nilai-nilai demokratis (Kahn 2013, 50). Generasi baru ini tumbuh dalam lingkungan ekonomi yang relatif lebih stabil dibandingkan generasi sebelumnya, sehingga memiliki orientasi politik yang berbeda (Kahn 2013, 55).

Kelas menengah terdidik cenderung lebih kritis terhadap praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketimpangan institusional (Lim 2018, 93). Mereka juga lebih aktif dalam mengakses informasi politik, berdiskusi di ruang publik digital, dan terlibat dalam gerakan masyarakat sipil (Lim 2018, 95). Dalam konteks teori modernisasi, kelompok ini menjadi aktor utama dalam mendorong

demokratisasi karena memiliki kapasitas ekonomi dan pendidikan yang memungkinkan mereka menuntut perubahan politik secara lebih terorganisir (Lim 2018, 98). Di Malaysia, kemunculan generasi muda urban yang terdidik menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatnya tuntutan terhadap reformasi politik (Mohd Hed 2017, 215).

3.2 Munculnya Tuntutan Masyarakat Sipil

Pergeseran orientasi sosiokultural masyarakat Malaysia tidak berhenti sebagai sebuah fenomena yang pasif, melainkan berubah menjadi aksi kolektif di ruang publik. Berdasarkan kerangka kausalitas Inglehart dan Welzel, ketika masyarakat telah mencapai ambang batas keamanan eksistensial, kesadaran emansipatif mereka akan berubah dalam bentuk tuntutan atas hak-hak politik substantif (Inglehart and Welzel 2005, 210). Dalam konteks Malaysia, manifestasi dari nilai-nilai ekspresi diri (*self-expression values*) bertransformasi menjadi gelombang gerakan sipil baru yang jauh lebih taktis, terdesentralisasi, dan dimotori oleh kelas menengah serta generasi muda yang mandiri secara ekonomi (Chong 2018, 116).

Fase awal dari perwujudan nilai *post-material* ini tercermin dari perubahan peran Gerakan Bersih pasca tahun 2018. Jika sebelumnya Gerakan Bersih bertindak sebagai motor pemicu runtuhnya hegemoni politik patronase, maka pada rentang tahun 2018–2023 gerakan ini bergeser menjadi jangkar konsolidasi yang fokus mengawal agenda reformasi institusional, seperti independensi komisi pemilu dan undang-undang pendanaan politik (Hooi 2020, 139). Transformasi tuntutan ini menunjukkan bahwa masyarakat Malaysia telah bergeser dari isu-isu pemenuhan kebutuhan material ke arah prosedur hukum yang adil dan akuntabilitas kekuasaan

negara (Hooi 2020, 163). Fenomena ini divalidasi secara empiris oleh data World Values Survey (WVS) Wave 7 Malaysia melalui variabel Q112 (*Perception of corruption*), yang merekam sensitivitas yang sangat tinggi dari masyarakat terhadap akutnya isu korupsi sistemik, serta rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi politik formal tradisional seperti partai politik dan parlemen (WVS 2018). Ketika saluran politik formal dinilai tidak lagi efektif menampung aspirasi moral, masyarakat memilih untuk menyalurkan agensi politik mereka melalui aksi kolektif di luar parlemen (Hooi 2020, 77).

Konsekuensi dari menguatnya nilai *self-expression* pada periode ini dimanifestasikan secara riil oleh kelompok generasi muda Malaysia melalui gerakan #Undi18 pada tahun 2018–2021. Mengacu pada data WVS Malaysia, kelompok usia di bawah 29 tahun merupakan basis populasi yang memiliki indikator agensi personal dan orientasi *post-materialist* murni yang paling progresif dibandingkan kelompok usia di atasnya (WVS 2018). Gerakan #Undi18 yang menuntut penurunan usia minimum pemilih dari 21 menjadi 18 tahun serta pendaftaran pemilih otomatis, adalah bukti nyata bahwa pemuda Malaysia menolak menjadi objek politik yang pasif (Saidin and Azrun 2025, 15). Tuntutan ini selaras dengan variabel WVS Q209 (*Signing a petition*) yang menunjukkan mayoritas kesediaan masyarakat untuk terlibat dalam petisi politik berhasil dikonversi menjadi tekanan sosiopolitik yang masif (WVS 2018). Hal ini pada akhirnya sukses memaksa amandemen konstitusi historis pada tahun 2019 dan mengubah peta elektoral Malaysia pada Pemilu 2022. (Saidin and Azrun 2025, 18).

Lebih jauh lagi, ketika instabilitas politik elite memuncak akibat fenomena *Sheraton Move* tahun 2020 yang memicu mosi ketidakpercayaan publik, resiliensi

nilai demokrasi di tingkat massa diuji melalui lahirnya gerakan #Lawan (2021) (Meredith 2024, 60). Di tengah pembatasan ruang gerak fisik akibat pandemi, aliansi sipil tetap mampu mengorganisasi demonstrasi damai di Dataran Merdeka untuk menuntut transparansi tata kelola negara dan pembukaan kembali parlemen (Meredith 2024, 61). Aksi ini didukung secara empiris oleh data variabel Q211 (*Attending peaceful demonstrations*) dalam laporan WVS, yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Malaysia dengan persentase 50,5% menyatakan telah melakukan (*have done*) atau bersedia melakukan (*might do*) aksi protes damai sebagai instrumen koreksi politik (WVS 2018).

Tabel 6. Simpulan Aksi Kolektif Tuntutan Masyarakat Sipil Malaysia Tahun 2018–2023

Nama Gerakan	Basis Massa Utama	Poin Utama Tuntutan	Manifestasi Nilai <i>Self-Expression</i> & Implikasi Politik
Transformasi Gerakan Bersih	Kelas Menengah Urban dan Lintas Etnis	• Independensi komisi pemilihan umum • Transparansi dan regulasi ketat pendanaan politik • Akuntabilitas kelembagaan hukum formal	Menandai pergeseran fokus dari sekadar meruntuhkan rezim korup menjadi pengawalan prosedur hukum yang adil. Divalidasi oleh sensitivitas tinggi publik terhadap isu korupsi (Skor WVS Q112: 8,00).
Gerakan #Undi18 (2018–2021)	Generasi Muda (Usia <29 Tahun)	• Penurunan usia minimum pemilih dari 21 menjadi 18 tahun • Implementasi pendaftaran pemilih secara otomatis	Merefleksikan agensi personal pemuda yang progresif. Tuntutan ini sukses dikonversi menjadi amandemen konstitusi historis pada 2019 yang merombak peta elektoral Malaysia secara permanen.

Gerakan #Lawan (2021)	Aliansi Masyarakat Sipil dan Aktivis Pemuda Urban	• Transparansi tata kelola negara di tengah situasi krisis • Pembukaan kembali parlemen dan penghentian represi politik elite	Menunjukkan resiliensi nilai demokrasi massa yang menolak penutupan ruang deliberasi publik. Didukung oleh data WVS Q211, di mana 50,5% warga bersedia melakukan aksi protes damai sebagai fungsi kontrol politik.
-----------------------------	--	--	--

Sumber: Olahan penulis dari Hooi (2020), Saidin and Azrun (2025), dan Meredith (2024)

Munculnya beberapa tuntutan dan gerakan masyarakat sipil ini menunjukkan bahwa masyarakat Malaysia mulai memandang demokrasi bukan sekadar sebagai mekanisme elektoral, tetapi sebagai sistem yang harus menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara (Meredith 2024, 56). Perubahan orientasi tersebut merupakan indikasi berkembangnya *self-expression values* dalam masyarakat, yang mana kualitas tata kelola dan kebebasan sipil menjadi aspek yang semakin penting dalam menentukan legitimasi politik pemerintah.

3.3 Peningkatan Kualitas Demokrasi dalam Proses Demokratisasi Malaysia Periode 2018-2023

Keberhasilan strategi industrialisasi Malaysia melalui *Third Industrial Master Plan* (IMP3) bertindak sebagai katalisator utama yang mengubah orientasi sosiokultural masyarakat Malaysia. Melalui efisiensi penyerapan modal di sektor manufaktur, masyarakat Malaysia mengalami peningkatan taraf hidup dan berhasil melampaui fase kecemasan material dasar (*survival values*) (Inglehart and Welzel

2005, 215). Kemudian, terpenuhinya jaminan keamanan eksistensial (*existential security*) secara berkelanjutan ini memicu pergeseran psikologi massa menuju nilai-nilai ekspresi diri (*self-expression values*) (Inglehart and Welzel 2005, 230). Kemandirian ekonomi yang dirasakan oleh kelas menengah baru Malaysia melahirkan agensi personal yang kuat, masyarakat tidak lagi dapat disetir oleh politik patronase, melainkan mulai mengalokasikan energi kolektif mereka untuk menuntut hak-hak sipil, transparansi pemerintahan, dan kebebasan sosial politik yang lebih luas (Dettman and Pepinsky 2024, 16).

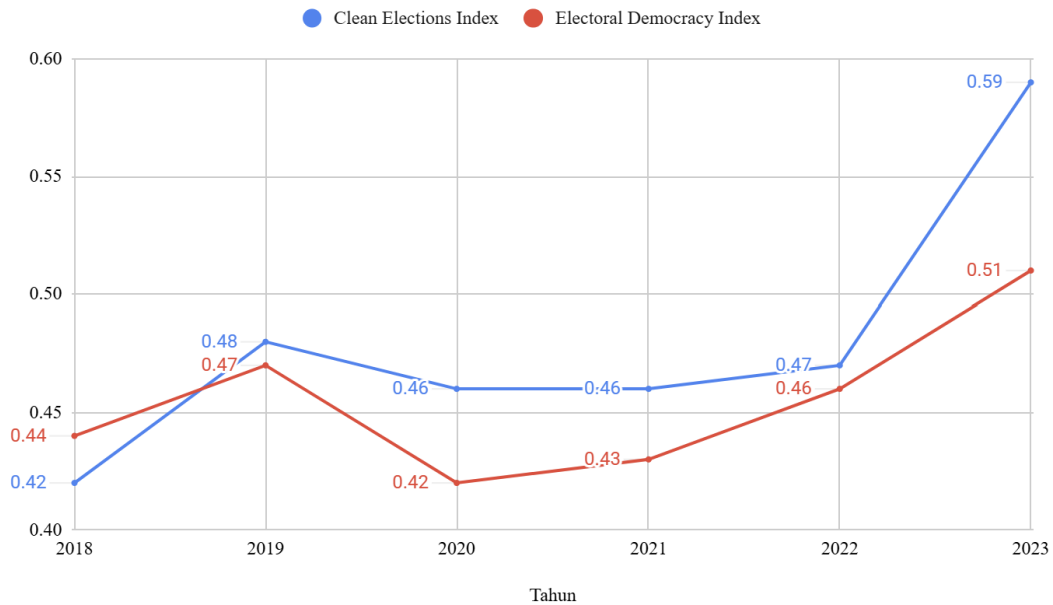
Pergeseran nilai internal ini tidak berhenti sebagai transformasi yang pasif, melainkan terwujud menjadi penguatan kapasitas otonom masyarakat sipil sebagai aktor penggerak utama yang mendesak demokratisasi dari bawah (Dettman and Pepinsky 2024, 15). Masyarakat sipil yang telah mengalami pergeseran nilai tidak lagi memandang partisipasi politik sebatas rutinitas setiap lima tahun sekali (Ostwald and Oliver 2020, 673). Mereka bertransformasi menjadi kekuatan penyeimbang (*counter-veiling power*) yang aktif mengorganisasi diri, membangun jaringan solidaritas lintas etnis, dan memanfaatkan ruang digital untuk mengontrol jalannya kekuasaan (Dettman and Pepinsky 2024, 18). Menguatnya kesadaran kolektif sosiokultural inilah yang menjadi bahan bakar utama bagi lahirnya gerakan sipil kontemporer yang masif dan terstruktur (Case 2024, 44). Keberanian sipil untuk melakukan koreksi terhadap otoritas negara, baik melalui tuntutan formal reformasi institusi pemilu, advokasi penurunan usia pemilih, hingga aksi protes damai di ruang publik, mencerminkan hilangnya ketakutan akan sanksi material dari penguasa (Case 2024, 46). Pada titik inilah, tekanan masif dari masyarakat sipil yang emansipatif secara struktural berhasil meruntuhkan sekat-sekat

otoritarianisme dan memaksa institusi politik formal negara untuk melakukan demokratisasi substantif (Case 2024, 53).

Kulminasi dari bekerjanya rangkaian mekanisme kausal ini didukung oleh validasi data dalam *Democracy Report 2024: Democracy Winning and Losing at the Ballot* yang diterbitkan oleh V-Dem Institute. Dokumen tersebut mencatat sebuah pencapaian monumental yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Malaysia, yakni Malaysia secara resmi dinyatakan berhasil keluar dari status *electoral autocracy* dan berubah menjadi *electoral democracy* pada tahun 2023 (V-Dem Institute 2024, 40). Lompatan besar ini mengonfirmasi bahwa Malaysia sukses melakukan pembalikan arah arus otoritarianisme (*U-turn democratization*) (V-Dem Institute 2024, 42).

Perubahan status rezim Malaysia ditopang oleh perbaikan substantif pada indikator-indikator dalam kuesioner Varieties of Democracy (V-Dem). Keruntuhan dominasi koalisi Barisan Nasional dalam Pemilu 2018, yang kemudian diikuti oleh transisi kekuasaan secara damai pada Pemilu 2022, bertindak sebagai apa yang diklasifikasikan oleh V-Dem sebagai “*critical events*” (V-Dem Institute 2024, 43). Pemilu di Malaysia telah berubah dari sekadar pelaksanaan demokrasi prosedural menjadi saluran bersih rakyat, melalui mobilisasi terorganisasi masyarakat sipil, menyalurkan nilai emansipatifnya untuk mendesak reformasi kelembagaan (Meredith 2024, 55).

Grafik 10. Tren Indeks Demokrasi Malaysia Tahun 2018-2023



Sumber: V-Dem (2026)

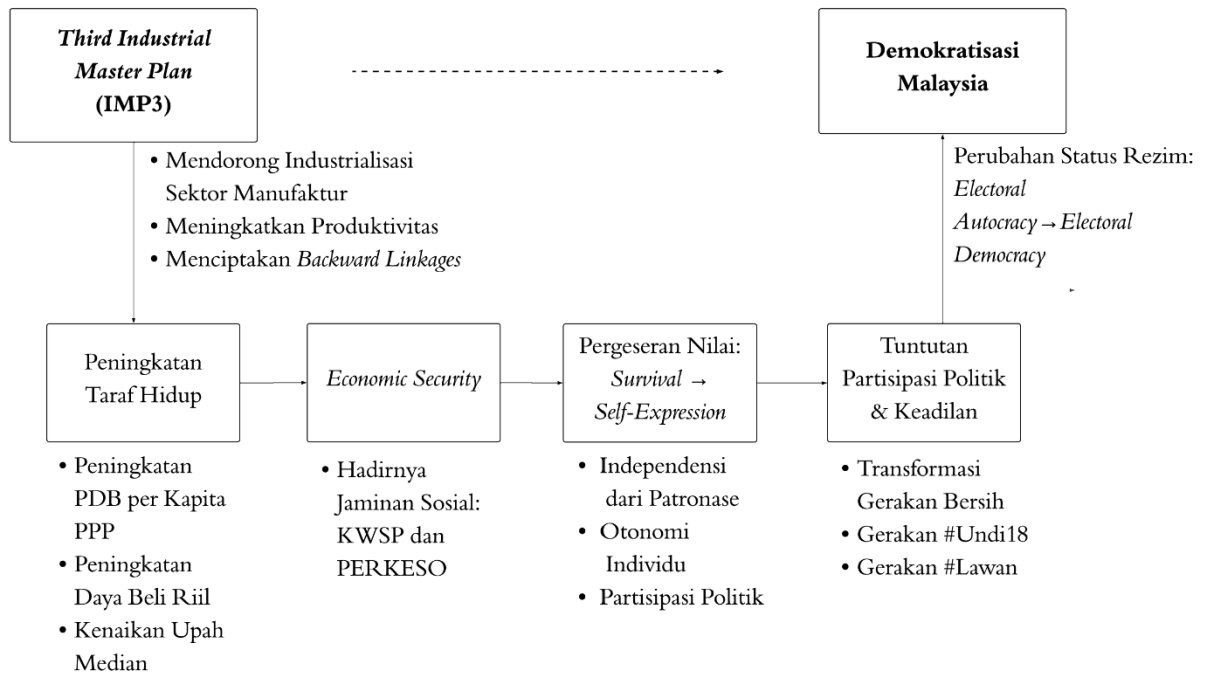
Lompatan status rezim Malaysia dari *electoral autocracy* menuju *electoral democracy* tidak dapat dipisahkan dari pergerakan positif skor *Electoral Democracy Index* (EDI) (V-Dem Institute 2024, 40). Seperti yang divisualisasikan pada grafik, skor EDI Malaysia mencatat kenaikan masif dan konsisten, bergerak dari baseline 0.44 pada tahun 2018 hingga menembus angka 0,51 pada tahun 2023 (V-Dem 2026). Secara teoretis, lonjakan kurva EDI ini merupakan cermin kuantitatif dari bangkitnya agensi masyarakat sipil yang telah mengalami pergeseran nilai pasca-materialisme. Mengingat struktur pembentuk EDI merangkum sub-komponen vital seperti *Expanded Freedom of Expression Index* dan kebebasan berserikat (V-Dem Institute 2024, 53). Perbaikan skor ini mengonfirmasi bahwa aksi kolektif masyarakat sipil berhasil memperluas ruang publik sipil serta menekan indeks represi negara secara signifikan (V-Dem Institute 2024, 42). Hal ini selaras dengan temuan umum V-Dem bahwa pemulihan kualitas

demokrasi (*U-turn democratization*) hampir selalu diawali oleh pembukaan kebebasan berekspresi dan penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil (V-Dem Institute 2024, 42).

Penguatan nilai emansipatif masyarakat sipil tersebut kemudian bertransmisi secara langsung pada pembersihan arena kompetisi politik formal, yang terekam secara valid melalui kenaikan skor *Clean Elections Index*. Indeks yang mengukur tingkat kebebasan, keadilan, dan integritas pemilu ini menjadi motor penggerak utama di balik meroketnya skor EDI Malaysia (V-Dem Institute 2024, 44). Dinamika kurva *Clean Elections Index* Malaysia sepanjang 2018–2023 membuktikan bahwa Pemilu 2018 dan Pemilu 2022 telah bertindak sebagai peristiwa kritis yang meruntuhkan hegemoni rezim otokratik lama (V-Dem Institute 2024, 42).

Di saat yang sama, pengakuan internasional atas disahkannya *Freedom of Information Act* serta penguatan hak berekspresi di ruang publik digital dan konvensional menjadi bukti nyata bahwa negara mulai tunduk pada tuntutan kualitas hidup warganya (Hadi et al. 2024, 223). Keberhasilan Malaysia untuk terus konsisten mempertahankan tren positif ini menempatkan negara ini ke dalam jajaran negara “*near misses of democratization*”, atau sebuah wilayah potensial yang diakui sebagai “*bright spots*” bagi pertumbuhan demokrasi substantif di masa depan (V-Dem Institute 2024, 41). Dengan demikian, rangkaian hipotesis penelitian ini terbukti secara utuh, industrialisasi yang sukses memaksa efisiensi ekonomi terbukti mampu mendistribusikan kemakmuran, mengubah nilai budaya massa, memperkuat ketangguhan masyarakat sipil, dan pada akhirnya melahirkan tatanan politik Malaysia yang jauh lebih demokratis, terbuka, dan akuntabel.

Diagram 2. Mekanisme Kausal Kontribusi *Third Industrial Master Plan* (IMP3) dalam Proses Demokratisasi Malaysia Tahun 2018–2023



Sumber: Olahan Penulis

Diagram mekanisme di atas menegaskan bahwa strategi industrialisasi melalui IMP3 bertindak sebagai variabel independen yang menyuntikkan modernisasi ke dalam struktur ekonomi Malaysia. Melalui perantara peningkatan taraf hidup dan didukung jaring pengaman sosial formal yakni KWSP dan PERKESO, tercipta bantalan *economic security* yang membebaskan mentalitas masyarakat dari *survival values*. Kemandirian sosiokultural inilah yang kemudian mengaktifkan *self-expression values* di tingkat akar rumput, mendorong penguatan agensi masyarakat sipil untuk menuntut reformasi kelembagaan, dan pada akhirnya memaksa sistem politik formal Malaysia bermutasi menjadi negara demokrasi elektoral yang substantif pada tahun 2023.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses industrialisasi Malaysia pada akhirnya berkontribusi dalam proses demokratisasi Malaysia periode 2018–2023. Proses tersebut berakar pada keberhasilan implementasi kebijakan *Third Industrial Master Plan* (IMP3) sebagai strategi industrialisasi Malaysia pada periode tersebut. IMP3 berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu memperkuat sektor manufaktur sebagai motor utama pembangunan ekonomi Malaysia melalui peningkatan investasi, pertumbuhan industri bernilai tambah tinggi, ekspansi ekspor, serta penciptaan lapangan kerja formal yang lebih luas. Keberhasilan tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin melalui meningkatnya GDP per kapita serta berkembangnya sistem perlindungan sosial seperti KWSP dan PERKESO yang memperkuat *economic security* masyarakat Malaysia.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan IMP3 tidak hanya menghasilkan dampak ekonomi sebagaimana tujuan awal kebijakan, melainkan juga memunculkan *unintended consequence* atau hasil ikutan berupa perubahan sosial-politik yang berkontribusi terhadap proses demokratisasi. Berlandaskan pada Teori Modernisasi yang dikembangkan oleh Ronald Inglehart dan Christian Welzel, peningkatan kesejahteraan dan *economic security* yang dihasilkan dari industrialisasi secara gradual mendorong terjadinya transformasi nilai dalam masyarakat Malaysia. Ketika kebutuhan material dasar semakin terpenuhi dan tingkat keamanan ekonomi meningkat, orientasi masyarakat mulai

bergeser dari *survival values* yang berfokus pada stabilitas ekonomi menuju *self-expression values* yang lebih menekankan kebebasan individu, akuntabilitas pemerintahan, keadilan, serta partisipasi politik yang lebih luas. Pergeseran nilai ini kemudian melahirkan masyarakat yang lebih kritis terhadap kualitas institusi politik dan semakin menuntut pemerintahan yang demokratis.

Transformasi nilai tersebut kemudian termanifestasi dalam meningkatnya tuntutan masyarakat sipil terhadap reformasi politik, transparansi, serta pemberantasan korupsi yang semakin kuat pada periode menjelang dan pasca tahun 2018. Dalam konteks ini, penelitian menemukan bahwa skandal *1Malaysia Development Berhad* atau 1MDB menjadi momentum politik yang mempercepat proses demokratisasi yang sebelumnya telah dibentuk secara gradual melalui modernisasi ekonomi. Skandal korupsi yang melibatkan pemerintahan Najib Razak memicu meningkatnya ketidakpuasan publik, memperkuat mobilisasi masyarakat sipil, serta memperbesar tuntutan terhadap perubahan politik yang lebih substantif. Dengan kata lain, kasus 1MDB bukan menjadi penyebab utama lahirnya demokratisasi, melainkan berfungsi sebagai katalisator yang mengakselerasi proses transformasi politik yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh perubahan struktur ekonomi dan perubahan nilai sosial masyarakat sebagai konsekuensi dari industrialisasi.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan demokratisasi Malaysia pada periode 2018–2023 tidak dapat dipahami semata sebagai hasil dari peristiwa politik elektoral atau krisis politik sesaat, melainkan merupakan hasil kumulatif dari proses industrialisasi jangka panjang yang berhasil menciptakan pembangunan ekonomi, memperkuat *economic security*, mendorong

transformasi nilai masyarakat, dan pada akhirnya melahirkan tuntutan terhadap sistem politik yang lebih demokratis. Temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan demokratisasi tidak selalu berjalan secara terpisah, melainkan dapat saling berkaitan melalui mekanisme perubahan sosial dan budaya yang berlangsung secara gradual.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan keterbatasan ruang lingkup, dinamika pembahasan, serta temuan empiris yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, penulis merumuskan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mendalami topik serupa. Penelitian masa depan direkomendasikan untuk memperluas ruang lingkup analisis melalui studi komparatif berskala regional di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini telah berhasil membuktikan bekerjanya mekanisme Teori Modernisasi Inglehart-Welzel di Malaysia, yang mana pertumbuhan ekonomi sektor manufaktur berhasil memicu pembalikan arah arus otoritarianisme (*U-turn democratization*) yang dibawa oleh gerakan masyarakat sipil. Namun, berdasarkan data komparatif Varieties of Democracy (V-Dem) tahun 2024, negara tetangga seperti Indonesia dan Thailand menunjukkan jalur dinamika rezim yang berbeda. Indonesia cenderung melandai di dalam *grey zone* elektoral, sedangkan Thailand merupakan kasus *bell-turn* yang sempat tergelincir kembali ke arah otoritarianisme pasca-krisis politik. Oleh karena itu, studi komparatif di masa depan akan sangat berharga untuk memetakan faktor-faktor spesifik apa saja yang membedakan resiliensi proses demokratisasi di antara negara-negara tersebut ketika sama-sama dihadapkan pada arus modernisasi ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Noorazeela Zainol, Umami Naiemah Saraih, and Intan Maizura Abd Rashid. 2022. *The Effect of Foreign Direct Investment on Wage in Malaysian Manufacturing Sector: New Evidence Using ARDL*. 21 (2): 86–105.
- Abidin, Rahimi, Norlena Hasnan, Nor Osman, Che Abdullah, and Shahimi Mohtar. 2014. “Technology Park Services: The Impact on Incubating Companies.” *Journal of Southeast Asian Research*, March 2, 1–9. <https://doi.org/10.5171/2014.674095>.
- Amin, Samir Muhazzab, Siti Shazwani Ahmad Suhaimi, and Nur Shuhamin Nazuri. 2023. “The Present and Future of Malaysian Technical and Vocational Education and Training (TVET).” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 13 (18): 107–17. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v13-i18/19952>.
- Asian Development Bank. 2025. *Accelerating Economic Growth: Malaysia's Transition Toward a High-Income Economy*. 0 ed. Asian Development Bank. <https://doi.org/10.22617/TCS250540-2>.
- Beach, Derek. 2020. “Case Studies and Process Tracing.” In *The SAGE Handbook of Political Science*, edited by Dirk Berg-Schlosser, Bertrand Badie, and Leonardo Morlino. SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781529714333.n20>.
- Case, William. 2024. “Thorns in the Flesh: Civil Society as Democratizing Agent in Malaysia.” In *Civil Society in Asia*. Routledge.
- Chataway, Joanna, and David Wield. 2000. “Industrialization, Innovation and Development: What Does Knowledge Management Change?” *Journal of International Development* 12 (6): 803–24. [https://doi.org/10.1002/1099-1328\(200008\)12:6%3C803::AID-JID714%3E3.0.CO;2-H](https://doi.org/10.1002/1099-1328(200008)12:6%3C803::AID-JID714%3E3.0.CO;2-H).
- Chong, Chan Tsu. 2018. “Democratic Breakthrough in Malaysia – Political Opportunities and the Role of Bersih.” *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 37 (3): 109–37. <https://doi.org/10.1177/186810341803700306>.
- Department of Statistic Malaysia. 2026. “Formal Sector Wages.” <https://open.dosm.gov.my/dashboard/formal-sector-wages>.
- Department of Statistics Malaysia. 2019. *Malaysia Economic Performance 2018*. Department of Statistics Malaysia.
- Department of Statistics Malaysia. 2024a. “Gross Domestic Product.” <https://open.dosm.gov.my/dashboard/gdp>.
- Department of Statistics Malaysia. 2024b. *Gross Domestic Product 2015-2023*. Department of Statistics Malaysia. https://open.dosm.gov.my/publications/gdp_2023.
- Department of Statistics Malaysia. 2024c. “Gross Value Added per Sector.” <https://open.dosm.gov.my/>.
- Department of Statistics Malaysia. 2024d. “Incremental Capital-Output Ratio.” <https://open.dosm.gov.my/>.
- Dettman, Sebastian, and Thomas B. Pepinsky. 2024. “Demographic Structure and Voting Behaviour during Democratization: Evidence from Malaysia’s 2022 Election.” *Democratization* 31 (1): 1–22. <https://doi.org/10.1080/13510347.2023.2254707>.

- Hadi, Khairul Anuar, Rohana Abdul Rahman, and Zainal Amin Ayub. 2024. "Freedom of Information in Malaysia: International Legal Instruments And Restrictions Under National Law." *UUM Journal of Legal Studies* 15 (1): 221–47. <https://doi.org/10.32890/uumjls2024.15.1.10>.
- Haraguchi, Nobuya, Charles Fang Chin Cheng, and Eveline Smeets. 2017. "The Importance of Manufacturing in Economic Development: Has This Changed?" *World Development* 93 (May): 293–315. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.12.013>.
- Hashim, Mohd Khairuddin. 2011. "Government Financial Assistance to Small and Medium-Sized Enterprises in Malaysia." In *Agenda for Sustaining Small and Medium-Sized Enterprises*. Universiti Utara Malaysia Press. <https://repo.uum.edu.my/id/eprint/6624/>.
- Hauge, Jostein. 2023. "The Rise of Services." In *The Future of the Factory*, 1st ed., by Jostein Hauge. Oxford University Press/Oxford. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198861584.003.0003>.
- Ho, Theresa C. F., Noor Hazlina Ahmad, and T. Ramayah. 2016. "Competitive Capabilities and Business Performance among Manufacturing SMEs: Evidence from an Emerging Economy, Malaysia." *Journal of Asia-Pacific Business* 17 (1): 37–58. <https://doi.org/10.1080/10599231.2016.1129263>.
- Hooi, Khoo Ying. 2020. *The Bersih Movement and Democratisation in Malaysia: Repression, Dissent and Opportunities*. Bloomsbury Publishing.
- Huber, Evelyne, Dietrich Rueschemeyer, and John D. Stephens. 1993. "The Impact of Economic Development on Democracy." *Journal of Economic Perspectives* 7 (3): 71–86. <https://doi.org/10.1257/jep.7.3.71>.
- IMF. 2024. *Malaysia: 2024 Article IV Consultation-Press Release*. International Monetary Fund. <https://www.elibrary.imf.org/downloadpdf/view/journals/002/2024/073/article-A001-en.pdf>.
- Inglehart, Ronald, and Christian Welzel. 2005. *Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence*. Cambridge University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9780511790881>.
- International IDEA. 2020. *Political Party Finance Reform in Southeast-Asia*. The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA).
- Kahn, Joel. 2013. "Growth, Economic Transformation, Culture and the Middle Classes in Malaysia." In *In The New Rich in Asia*. Routledge.
- Kaldor, Nicholas. 1968. *Productivity and Growth in Manufacturing Industry: A Reply*. 35 (140): 385–91.
- Kamaruddin, Nurliana, and Roy Anthony Rogers. 2020. "Malaysia's Democratic and Political Transformation." *Asian Affairs: An American Review* 47 (2): 126–48. <https://doi.org/10.1080/00927678.2020.1715046>.
- Karim, Noor Al-Huda Abdul, and Shabbir Ahmad. 2012. *Human Capital and the Development of Manufacturing Sector in Malaysia*. 4 (4): 106–16.
- Khoo, Gaik Cheng. 2022. "Bersih and Civic Empowerment in Malaysia." In *Regime Resilience in Malaysia and Singapore*, by Greg Lopez and Bridget Welsh. WORLD SCIENTIFIC. https://doi.org/10.1142/9789811268663_0005.

- Khoo, Ying Hooi. 2016. "Malaysia's 13th General Elections and the Rise of Electoral Reform Movement." *Asian Politics & Policy* 8 (3): 418–35. <https://doi.org/10.1111/aspp.12273>.
- Kinuthia. 2009. "Industrialization in Malaysia: Changing Role of Government and Foreign Firms." *Dynamics, Economic Growth, and International Trade*, 1–36. https://ideas.repec.org/p/deg/conpap/c014_049.html.
- Kinuthia. 2011. "Markets vs. Government: Foreign Direct Investment and Industrialization in Malaysia." *Economía Mexicana. Nueva Época* 20 (2): 409–43.
- Kniivilä, Matleena. 2007. "Industrial Development and Economic Growth: Implications for Poverty Reduction and Income Inequality." *Industrial Development for the 21st Century* 1 (3): 295–333.
- Lebdoui, Amir. 2022. "The Political Economy of Moving up in Global Value Chains: How Malaysia Added Value to Its Natural Resources through Industrial Policy." *Review of International Political Economy* 29 (3): 870–903. <https://doi.org/10.1080/09692290.2020.1844271>.
- Lee, Hwok-Aun. 2022. "Malaysia's New Economic Policy: Fifty Years of Polarization and Impasse." *Southeast Asian Studies* 11 (2): 299–329. https://doi.org/10.20495/seas.11.2_299.
- Leh, Fauziah Che. 2015. "The Decision-Making Process among Multinational Corporations (MNCs) and Its Impact on Production of Electrical and Electronics Firms in Penang and Kulim Hi-Tech Park." *Australian Journal of Basic and Applied Sciences* 9 (13): 127–34.
- Lew, Sharon, and Zuraidah Sulaiman. 2014. "Consumer Purchase Intention toward Products Made in Malaysia vs. Made in China: A Conceptual Paper." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 130 (May): 37–45. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.005>.
- Liang, Hong, and Hooi Hooi Lean. 2024. "Fifty Years of Excellence and beyond: The Electrical and Electronic Industry of Penang, Malaysia." In *Economic Growth and Development in the Tropics*. Routledge.
- Lim, Merlyna. 2018. "Roots, Routes, and Routers: Communications and Media of Contemporary Social Movements." *Journalism & Communication Monographs* 20 (2): 92–136. <https://doi.org/10.1177/1522637918770419>.
- Lu, Qing, and Ravichandran Moorthy. 2026. "Strategic Responses and Regional Pressures: Malaysia in the U.S.-China Semiconductor Competition." *The Pacific Review* 39 (1): 177–207. <https://doi.org/10.1080/09512748.2025.2530476>.
- Malaysian Investment Development Authority. 2018a. *Annual Report 2018*. Malaysian Investment Development Authority. https://www.mida.gov.my/wp-content/uploads/2020/07/20200204083911_MIDA_AR2018_Eng_Final.pdf.
- Malaysian Investment Development Authority. 2018b. "Investment in Manufacturing Sector." Malaysian Investment Development Authority. https://www.mida.gov.my/wp-content/uploads/2024/01/ENG-MIDA_Policy-Booklet_MK-2022_Updated_11_01.pdf.
- Malaysian Investment Development Authority. 2021. *Malaysia Investment Performance Report: Powering Resilience*. Malaysian Investment

- Development Authority. <https://www.mida.gov.my/wp-content/uploads/2022/03/MIDA-IPR-2021-1.pdf>.
- Malaysian Investment Development Authority. 2024. *Malaysia Investment Performance Report 2023*. Malaysian Investment Development Authority.
- Martin, Nicolas. 2014. "The Dark Side of Political Society: Patronage and the Reproduction of Social Inequality." *Journal of Agrarian Change* 14 (3): 419–34. <https://doi.org/10.1111/joac.12039>.
- Martin, Tulasi, Muhammad Ashraf Fauzi, Kesavan Nallaluthan, and Komathy Balasundran. 2021. "The Role of Manufacturing Exports in the Economic Development in Malaysia." *International Journal of Academic Reserach in Economics and Management Sciences* 10 (2): 87–101.
- Meredith, L. Weiss. 2024. "Civil Society and Political Reform in Malaysia." In *Civil Society in Asia*, 1st ed. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003572916>.
- Ministry of Investment, Trade and Industry Malaysia. 2006. "Third Industrial Master Plan (IMP3)." Ministry of Investment, Trade and Industry Malaysia. <https://www.miti.gov.my/index.php/pages/view/contentb7e5.html>.
- Mohamed, Zamri, Zarina Abd Kadir, and Nurul Alya Abdul Raof. 2018. "Malaysia Industrial Master Plans (IMPs) and the Focus on the Nation Technology and Innovation Development." *Journal of Science, Technology and Innovation Policy* 4 (2): 11–19. <https://doi.org/10.11113/jostip.v4n2.33>.
- Mohd Hed, Norhafiza. 2017. "The Dynamics of Youth Political Participation in Southeast Asia: The Case of Malaysia." University of Sheffield. <https://etheses.whiterose.ac.uk/id/eprint/18997/>.
- Mohiuddin, Asif. 2024. "Democratic Discourse in Context: Malaysia's Approach to Freedom of Expression." In *Human Rights Law in Egypt and Malaysia: Freedom of Religion and Expression, Volume 1*, by Asif Mohiuddin. Political Economy of Islam. Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-63859-6_5.
- Munoz, J. Mark, Dianne H. B. Welsh, Sow Hup Chan, and Peter V. Raven. 2015. "Microenterprises in Malaysia: A Preliminary Study of the Factors for Management Success." *International Entrepreneurship and Management Journal* 11 (3): 673–94. <https://doi.org/10.1007/s11365-014-0302-y>.
- Nadzri, Muhamad M. N. 2018. "The 14th General Election, the Fall of Barisan Nasional, and Political Development in Malaysia, 1957-2018." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 37 (3): 139–71. <https://doi.org/10.1177/186810341803700307>.
- Narayanan, Suresh, and Lai Yew-Wah. 2018. "Innovation Policy in Malaysia." In *Innovation Policy in ASEAN*. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia.
- Naudé, Wim, and Adam Szirmai. 2012. "The Importance of Manufacturing in Economic Development: Past, Present and Future Perspectives." *Maastricht Economic and Social Research* 1 (1): 1–57.
- Ostwald, Kai, and Steven Oliver. 2020. "Four Arenas: Malaysia's 2018 Election, Reform, and Democratization." *Democratization* 27 (4): 662–80. <https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1713757>.

- Persson, Torsten, and Guido Tabellini. "Democratic capital: The nexus of political and economic change." *American Economic Journal: Macroeconomics* 1, no. 2 (2009): 88-126.
- Przywara, Rainer. 2019. "The Interrelation between Manufacturing Productivity, Maximum Sectoral Employment and National Income Per Capita." *Athens Journal of Business & Economics* 5 (2): 93–122. <https://doi.org/10.30958/ajbe.5-2-1>.
- Rabi, Amjad, Norma Mansor, Halimah Awang, and Nurul Diyana Kamarulzaman. 2019. *Longevity Risk and Social Old-Age Protection in Malaysia: Situation Analysis and Options for Reform*. Social Wellbeing Research Centre (SWRC).
- Rasiah, Rajah. 2010. "Are Electronics Firms in Malaysia Catching Up In The Technology Ladder?" *Journal of the Asia Pacific Economy* 15 (3): 301–19. <https://doi.org/10.1080/13547860.2010.494910>.
- Rasiah, Rajah, Vicki Crinis, and Hwok-Aun Lee. 2015. "Industrialization and Labour in Malaysia." *Journal of the Asia Pacific Economy* 20 (1): 77–99. <https://doi.org/10.1080/13547860.2014.974327>.
- Rasiah, Rajah, Nurliana Kamaruddin, and Wah Yun Low. 2023. *Digitalization and Development: Ecosystem for Promoting Industrial Revolution 4.0 Technologies in Malaysia*. 1st ed. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003367093>.
- Rasiah, Rajah, Rohaya Mohd-Nor, and Miao Zhang. 2024. "Charting the Economy: Revisiting the Industrial Policy Experience of Malaysia." *International Journal of Business and Society* 25 (Special_Issue): 26–38. <https://doi.org/10.33736/ijbs.8194.2024>.
- Saidin, Mohd Irwan Syazli, and Nabighah Azrun. 2025. "Barriers to Youth Political Participation: Insights from Malaysia's Lowered Voting Age Policy (Undi18) in the 15th General Election." *Cogent Social Sciences* 11 (1): 1–20. <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2491710>.
- Samsuddin, Shamshimah, and Noriszura Ismail. 2018. "Corak Perbelanjaan Kesihatan Pekerja Di Malaysia: Kajian Kes Terhadap Pencarum Skim Bencana Pekerjaan (SBP), PERKESO." *Sains Humanika* 11 (1): 21–28. <https://doi.org/10.11113/sh.v11n1.1245>.
- Sevcenko, Victoria, Lynn Wu, Aleksandra (Olenka) Kacperczyk, and Sendil Ethiraj. 2022. "Surplus Division between Labor and Capital: A Review and Research Agenda." *Academy of Management Annals* 16 (1): 334–90. <https://doi.org/10.5465/annals.2019.0130>.
- Seyoum, Belay. 2024. "Industrialization and the Role of Foreign Direct Investment." In *State Fragility, Business, and Economic Performance*, by Belay Seyoum. Palgrave Studies in Democracy, Innovation, and Entrepreneurship for Growth. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-44776-1_5.
- Shahidul, M. I., and Syed Shazali. 2011. "Dynamics of Manufacturing Productivity: Lesson Learnt from Labor Intensive Industries." *Journal of Manufacturing Technology Management* 22 (5): 664–78. <https://doi.org/10.1108/17410381111134491>.

- Su, Dan, and Yang Yao. 2017. "Manufacturing as the Key Engine of Economic Growth for Middle-Income Economies." *Journal of the Asia Pacific Economy* 22 (1): 47–70. <https://doi.org/10.1080/13547860.2016.1261481>.
- Treisman, Daniel. 2020. "Economic Development and Democracy: Predispositions and Triggers." *Annual Review of Political Science* 23 (1): 241–57. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-050718-043546>.
- UNIDO. 2025. "The Multiplier Effect of Industrial Jobs." Policy Brief. United Nations Industrial Development Organization. <https://www.unido.org/sites/default/files/unido-publications/2025-03/IID%20Policy%20Brief%2018%20-%20Multiplier%20effect%20of%20industrial%20jobs.pdf>.
- Van Noort, Sam. 2024. "Industrialization and Democracy." *World Politics* 76 (3): 457–98. <https://doi.org/10.1353/wp.2024.a933069>.
- V-Dem. 2026. "Malaysia Country Graph." Electoral Democracy Index, Liberal Democracy Index. https://v-dem.net/data_analysis/CountryGraph/.
- V-Dem Institute. 2024. *Democracy Report 2024: Democracy Winning and Losing at the Ballot*. Varieties of Democracy (V-DEM).
- Wahyuni, Sari, Alia Noor Anoviar, and Anom Jati Santoso. 2012. "The Key Success Factors of Penang as the Silicon Valley of the East." *SBS Journal of Applied Business Research* 1 (1): 34–47. <https://doi.org/10.70301/fkek6246>.
- Wai. 1985. *Study of ICOR in Developing Countries*. 9 (5): 225–63.
- Wai, Khoong Tai. 2016. "Perancangan kewangan dan aplikasi teori tingkah laku kewangan dan teori keperluan Maslow: Kajian kes KWSP di Malaysia." *Malaysian Journal of Society and Space* (Kuala Lumpur) 12 (8): 10–21.
- Warren, Mark E. "Governance-driven democratization." *Critical policy studies* 3, no. 1 (2009): 3–13.
- Wong, Annie Pooi Hang, and Daisy Mui Hung Kee. 2022. "Driving Factors of Industry 4.0 Readiness among Manufacturing SMEs in Malaysia." *Information* 13 (12): 2–35. <https://doi.org/10.3390/info13120552>.
- World Bank. 2026a. "GDP (Constant 2015 US\$) - Malaysia." <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?locations=MY&start=2018>.
- World Bank. 2026b. "GDP per Capita, PPP (Current International \$) - Malaysia." <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?end=2024&locations=MY&start=2016&view=chart>.
- WVS. 2012. *World Values Survey Wave 6 - Malaysia*. World Values Survey.
- WVS. 2018. *World Values Survey Wave 7 - Malaysia*. World Values Survey.
- Yunus, Norhanishah, and Norehan Abdullah. 2022. "Effect Of Foreign Direct Investment On Labour Productivity." *Malaysian Management Journal* 26 (1): 55–86. <https://doi.org/10.32890/mmj2022.26.3>.
- Zang, Xiaojing. 2009. *Producer Service and the Added Value of Manufacturing Industries: An Empirical Research Based on Various Industries of Different Countries*. 1 (2): 21–26.